



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KANTOR WILAYAH JAWA BARAT  
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PURWAKARTA

**Clarity in Transition**  
Hadapi Transisi, Kinerja Teruji

**Laporan Kinerja**  
**KPKNL Purwakarta**

**2025**

## PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta telah menyusun Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2025. Penyusunan Laporan Kinerja ini berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, serta Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor ND-4486/KN.1/2025 tanggal 31 Desember 2025 perihal Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2025.

Pencapaian akuntabilitas kinerja KPKNL Purwakarta tidak terlepas dari berbagai hambatan dan tantangan, baik yang bersumber dari internal maupun eksternal organisasi. Kondisi tersebut secara langsung memengaruhi upaya pencapaian tujuan organisasi secara terarah, yang pada akhirnya berdampak pada pencapaian visi dan misi organisasi.

Diharapkan, penyusunan Laporan Kinerja ini dapat memberikan gambaran kinerja yang jelas, terukur, dan transparan, sekaligus menjadi bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan upaya pencapaian visi dan misi yang diemban oleh KPKNL Purwakarta. Seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan di bidang pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang, diperlukan komitmen untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Dengan semangat reformasi birokrasi serta berlandaskan nilai-nilai Kementerian Keuangan, yaitu integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan, pelaksanaan tugas diharapkan dapat memenuhi ekspektasi publik.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 ini juga tidak terlepas dari dukungan, kontribusi, dan pemikiran berbagai pihak. Oleh karena itu, kepada seluruh jajaran KPKNL Purwakarta yang telah berperan aktif dan memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja organisasi, disampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya. Kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar kita semua senantiasa dilimpahkan rahmat dan hidayahNya.

Purwakarta  
Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik  
Harmani Sri Mumpuni



## DAFTAR ISI

<b>PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	2
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	3
A. Latar Belakang .....	3
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi KPKNL Purwakarta .....	4
C. Permasalahan Utama ( <i>Strategic Issue</i> ) .....	9
1. Permasalahan di Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara .....	9
2. Permasalahan di Seksi Pengurusan Piutang Negara .....	9
3. Permasalahan di Pelayanan Penilaian .....	9
4. Permasalahan di Pelayanan Lelang .....	10
5. Permasalahan di Seksi Hukum dan Informasi .....	10
6. Permasalahan di Seksi Subbagian Umum .....	10
7. Permasalahan di Seksi Kepatuhan Internal .....	11
<b>BAB II RENCANA KINERJA</b> .....	12
A. Rencana Strategis .....	12
B. Penetapan Kinerja .....	14
C. Addendum Kontrak Kinerja .....	20
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	21
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	21
B. Realisasi Anggaran dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2025 Pada KPKNL Purwakarta .....	53
C. Kinerja Lain-lain .....	54
1. Inovasi .....	54
2. Prestasi dan Penghargaan Tahun 2025 .....	58
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	59

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*) dan sumber daya manusia aparatur. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sebagai bagian dari Kementerian Keuangan menerapkan reformasi birokrasi sesuai amanat peraturan perundangan, memiliki peran strategis dalam pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan lelang.

Mengingat sangat pentingnya peran tersebut, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta, sebagai instansi vertikal DJKN merupakan ujung tombak yang langsung berhubungan dengan masyarakat pengguna jasa (stakeholder), terus berupaya meningkatkan pelayanan dan kinerja secara sistematis dan berkesinambungan dengan memaksimalkan sumber daya yang ada. Di samping itu, upaya peningkatan pelayanan dan kinerja dilaksanakan secara sinergis dan komprehensif sehingga terwujud pelayanan terbaik dan sikap kerja yang profesional, akuntabel, transparan sesuai dengan tujuan reformasi birokrasi sehingga dapat menjadi kantor pelayanan yang dibanggakan oleh masyarakat.

Salah satu langkah kongkrit yang dilakukan oleh KPKNL Purwakarta dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kinerja diantaranya melaksanakan secara konsisten berbagai kebijakan terkait dengan tugas dan fungsinya sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan, dengan berpedoman pada standar pelayanan publik sebagaimana diatur dalam:

1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN & RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
4. Keputusan Menteri Keuangan nomor 56/PMK.01/2021 tentang Pedoman standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Keuangan.
5. Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara nomor: Kep-60/KN/2023 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan negara

Di samping hal-hal tersebut di atas, KPKNL Purwakarta sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, menjadi salah satu pilar dalam mewujudkan Reformasi Keuangan

Negara yang dicanangkan oleh Menteri Keuangan, dengan dilandasi oleh tiga paket Undang-undang di bidang Keuangan Negara, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; dan
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Salah satu peranan KPKNL dalam mewujudkan Reformasi Keuangan Negara tersebut diantaranya adalah mewujudkan nilai kekayaan negara (Barang Milik Negara) yang wajar dalam neraca pemerintah (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat) melalui kegiatan inventarisasi dan penilaian Barang Milik Negara.

## **B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi KPKNL Purwakarta**

KPKNL Purwakarta yang beralamat di Jalan Siliwangi Nomor 9 Kabupaten Purwakarta merupakan unit vertikal DJKN Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan Negara, penilaian, piutang negara, dan lelang dalam rangka mendukung visi dan misi DJKN sebagai pengelolaan kekayaan Negara yang wilayah kerjanya meliputi Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang dengan total luas wilayah seluas 4.776,75 Km<sup>2</sup>. Stakeholder yang dilayani KPKNL Purwakarta, yaitu:

- Untuk Pengelolaan Kekayaan Negara sejumlah 93 satker;
- Pelayanan Penilaian sejumlah 93 satker dan 3 pemerintah daerah;
- Pelayanan Lelang melayani dari perbankan dan non perbankan termasuk pembeli lelang;
- Piutang Negara mengurus piutang negara macet dari instansi pemerintah pusat dan daerah.

KPKNL Purwakarta berperan dalam meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa biaya administrasi pengurusan piutang negara dan bea lelang, maupun dalam melakukan pengamanan kekayaan negara melalui kegiatan inventarisasi dan penilaian Barang Milik Negara dan sertifikasi tanah pemerintah (Penertiban Barang Milik Negara). Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, KPKNL Purwakarta selalu menjunjung tinggi nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan dan Kesempurnaan guna mewujudkan reformasi birokrasi berkesinambungan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dalam rangka memberikan arah, inspirasi, serta menjaga semangat kerja seluruh jajarannya, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dalam hal ini KPKNL Purwakarta memiliki visi dan misi sebagai berikut:

## VISI

“Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”.

## MISI

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara.
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum.
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara.
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan.
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Dalam tatanan operasional, visi dan misi tersebut akan terus diupayakan untuk dicapai. Untuk mencapai visi dan misi tersebut, KPKNL Purwakarta telah memberi motivasi dan arah kerja kepada seluruh pegawai dengan motto **”BAIK”**.

**Bersih** : Bekerja dengan ikhlas, tanpa pamrih dalam melayani stakeholder.

**Akuntabel** : Hasil Kerja dapat dipertanggung jawabkan secara transparan sesuai dengan ketentuan.

**Inovatif** : Selalu menemukan cara baru dalam bekerja untuk menghadapi dinamika organisasi.

**Konsisten** : Bekerja dengan baik secara terus menerus dalam kondisi apapun.

Melalui motto tersebut, diharapkan setiap pegawai KPKNL Purwakarta dalam melaksanakan tugas bergerak bersama ke arah yang lebih baik dalam segala aspek sesuai Nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan.

Berdasarkan **Pasal 31 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara**, KPKNL Purwakarta mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang. Dalam melaksanakan tugas tersebut KPKNL Purwakarta menyelenggarakan fungsi:

1. Inventarisasi, Pengadministrasian, Pendayagunaan, Pengamanan Kekayaan Negara;
2. Registrasi, Verifikasi Dan Analisa Pertimbangan Permohonan Pengalihan Serta Penghapusan Kekayaan Negara;

3. Pelaksanaan pengurusan piutang Negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
4. Pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang Negara;
5. Pelaksanaan Pelayanan Penilaian;
6. Pelaksanaan Pelayanan Lelang;
7. Penyajian Informasi di bidang Kekayaan Negara, Penilaian, Piutang Negara Dan Lelang;
8. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi Pengurusan Piutang Negara dan Lelang;
9. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran Piutang Negara dan hasil lelang; dan
10. Pelaksanaan administrasi KPKNL.

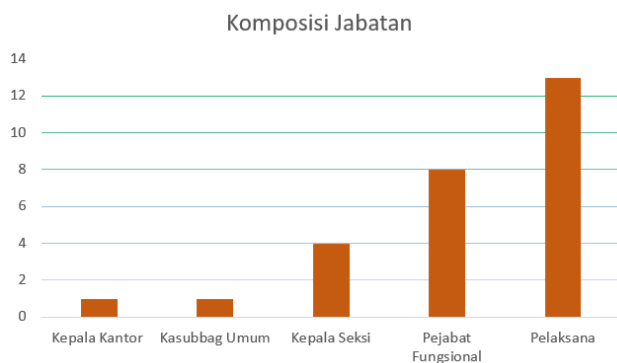
### Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Struktur organisasi pada KPKNL Purwakarta adalah sebagai berikut :

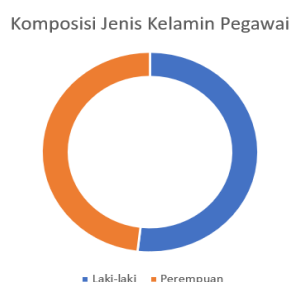


Rincian sumber daya manusia pada KPKNL Purwakarta adalah sebagai berikut:

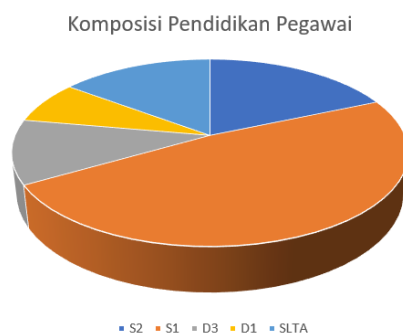
A. ASN sebanyak 27 Pegawai



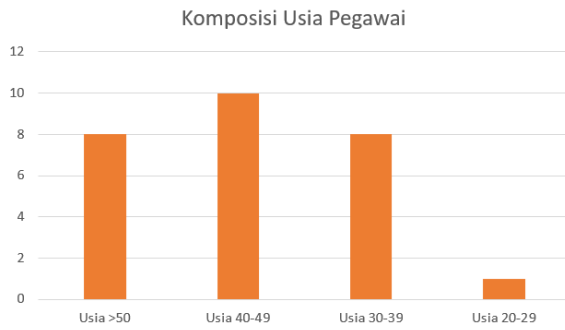
- Menurut Jenis Kelamin:  
terdiri dari 14 orang pegawai laki-laki dan 13 orang pegawai perempuan



- Menurut Tingkat Pendidikan:  
Pendidikan S2 5 orang pegawai  
Pendidikan S1/DIV 13 orang pegawai  
Pendidikan D3 3 orang pegawai  
Pendidikan D1 2 orang pegawai  
Pendidikan SLTA/Sederajat 4 orang pegawai

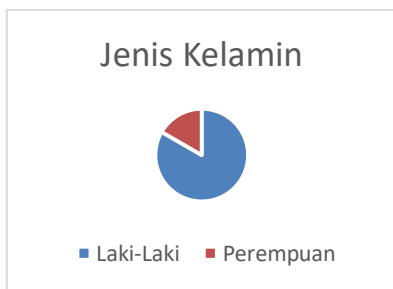


- Menurut tingkatan usia:  
Usia 50 tahun keatas 8 orang pegawai  
Usia 40-49 tahun 10 orang pegawai  
Usia 30-39 tahun 8 orang pegawai  
Usia 20-29 tahun 1 orang pegawai

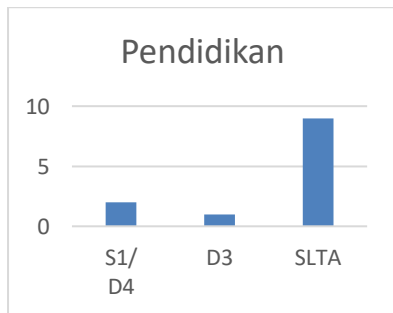


**B. PNPB sebanyak 12 pegawai**

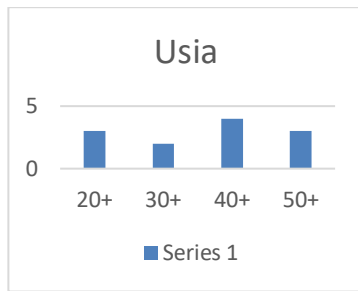
- Menurut Jenis Kelamin:  
terdiri dari 10 orang pegawai laki-laki dan 2 orang pegawai perempuan



- Menurut Tingkat Pendidikan:  
Pendidikan S1/DIV 2 orang pegawai  
Pendidikan D3 1 orang pegawai  
Pendidikan SLTA/Sederajat 9 orang pegawai



- Menurut tingkatan usia:  
Usia 50 tahun keatas 3 orang pegawai  
Usia 40-49 tahun 4 orang pegawai  
Usia 30-39 tahun 2 orang pegawai  
Usia 20-29 tahun 3 orang pegawai



### C. Permasalahan Utama (*Strategic Issue*)

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya (*business process*) untuk mewujudkan visi dan misi serta tujuan organisasi, KPKNL Purwakarta mengalami beberapa kendala/permasalahan, diantaranya sebagai berikut:

#### 1. Permasalahan pada Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan kekayaan negara serta pencapaian target kinerja terkait pengelolaan kekayaan negara yang menjadi isu utama, diantaranya: Pencapaian target IKU Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan.

KPKNL Purwakarta mempunyai target sebanyak 348 bidang tanah dengan rincian, yaitu: kategori K1 sebanyak 78 bidang, K2 sebanyak 4 bidang, K3 sebanyak 266 bidang, dan tidak ada target bidang tanah kategori K4. Dari target 348 bidang tanah, 75% adalah target bidang Subordinasi, sehingga memiliki tingkat kendali aksi yang rendah dalam pencapaian targetnya serta menyulitkan dalam koordinasi karena satuan kerja berada di luar kewenangan KPKNL Purwakarta.

Di samping itu, adanya penghematan anggaran sertifikasi BMN Tanah pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, menyebabkan terlambatnya proses penyelesaian pensertipikatan.

#### 2. Permasalahan pada Seksi Piutang Negara

Target penurunan outstanding piutang negara serta target PNB dari biaya administrasi pengurusan Piutang Negara (PN) memiliki tantangan dalam pencapaiannya disebabkan BKPN yang diurus adalah BKPN yang memiliki potensi diselesaikan yang rendah baik karena barang jaminan yang tidak *marketable* ataupun bermasalah, maupun piutang penyerahan yang tidak memiliki barang jaminan maupun Penanggung Hutang memiliki tingkat kemampuan membayar yang rendah untuk menyelesaikan hutang.

#### 3. Permasalahan pada Seksi Pelayanan Penilaian

Dalam pelaksanaan proses penilaian masih terdapat beberapa permasalahan, diantaranya:

- a. Terdapat permohonan penilaian Non-BMN dengan jumlah objek yang banyak yang masuk dalam waktu yang bersamaan dengan permohonan penilaian BMN, sehingga menyebabkan waktu pengerjaan laporan yang terbatas.
- b. Keterbatasan data pasar yang tersedia di lapangan untuk proses penyusunan laporan penilaian karena masyarakat belum terbuka terhadap transaksi tanah.

#### **4. Permasalahan pada Seksi Pelayanan Lelang**

Dalam pelayanan lelang serta pencapaian target di bidang lelang, terdapat permasalahan yang dihadapi, antara lain: Pencapaian target pokok lelang dan PNBP dari bea lelang seringkali terkendala rendahnya hasil penjualan secara lelang ditandai dengan masih banyaknya lelang Tidak Ada Peminat (TAP) yang berasal dari jenis lelang eksekusi Hak Tanggungan permohonan Perbankan dan lelang eksekusi pailit yang disebabkan calon pembeli cenderung menghindari risiko pascalelang, calon pembeli belum siap, dan juga obyek lelang yang kurang *marketable*. Selain itu, masih kerap terjadi proses Lelang Batal yang disebabkan penjual membatalkan permohonan lelang maupun yang dibatalkan karena persyaratan lelang tidak lengkap/tidak terpenuhi.

#### **5. Permasalahan pada Seksi Hukum dan Informasi**

Permasalahan yang kerap terjadi pada Seksi Hukum dan Informasi secara umum, sebagai berikut:

- a. Dalam hal pengembalian uang jaminan lelang, masih terdapat peserta lelang mencantumkan nomor rekening, nama rekening dan nama Bank yang salah, sehingga menghambat Bendahara Penerima dalam pengembalian tepat waktu dan akhirnya terjadi miskomunikasi antara peserta lelang tersebut dengan KPKNL Purwakarta.
- b. Tidak adanya pernyataan yang jelas pada penggunaan NPWP untuk penyetoran PPh final pada transaksi lelang, mengakibatkan adanya perbedaan penafsiran penggunaan NPWP pada masing-masing KPKNL. Hal tersebut juga dilatarbelakangi karena perbedaan kebijakan dari masing-masing Kantor Pelayanan Pajak di wilayah kerjanya sehingga Bendahara Penerimaan mengalami hambatan setiap akan menyetorkan PPh Final yang berasal dari transaksi lelang.

#### **6. Permasalahan pada Subbagian Umum**

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Umum serta dalam pencapaian target kinerja di Subbagian Umum, permasalahan yang paling signifikan terjadi pada tahun 2025, diantaranya:

- a. Kendala pada ketersediaan SDM pegawai untuk mengurus arsip yang menjadi IKU Subbagian Umum. Terdapat pegawai yang mutasi keluar dan promosi tetapi belum ada penggantian sesuai kebutuhan. Akibatnya, pengurusan arsip mengalami kelambatan.

Tusi lain yang semakin khusus, adalah penata laksana BMN. Saat ini penatalaksanaan BMN dilakukan oleh pegawai yang bukan Jafung Penata Laksana Barang.

- b. Adanya standar terbaru untuk layanan APT yang mengharuskan adanya pramu sapa dan resepsionis sangat dipengaruhi oleh jumlah pegawai yang harus bertugas di front office selain mereka juga harus menyelesaikan tugas masing-masing. Sebaiknya untuk pegawai front office juga dijadikan sebagai tugas yang terdedikasi.
- c. Adanya belanja modal berupa pembangunan empat unit rumah dinas yang dimulai di triwulan III mengakibatkan Rencana Penarikan Dana (RPD) dan kewajiban pembayaran menumpuk di akhir tahun. Sebaiknya untuk belanja modal terutama yang memakai mekanisme LPSE dan pokja bisa diadakan di awal tahun sehingga bisa lebih rileks untuk Rencana Penarikan Dana (RPD) beserta pemenuhan syarat pembayaran.

## **7. Permasalahan pada Seksi Kepatuhan Internal**

Isu strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi terkait Kepatuhan Internal, yaitu:

- a. Peraturan dan pedoman yang menjadi acuan pelaksanaan tugas pada Seksi Kepatuhan Internal secara dinamis mengalami perubahan dari Kantor Pusat DJKN sehingga memerlukan penyesuaian yang cepat dan tepat dalam pelaksanaannya.
- b. Adanya kepentingan dari pihak lain terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pada KPKNL menyebabkan kemungkinan adanya moral hazard atau konflik kepentingan yang dapat menghambat kelancaran tugas, sehingga diperlukan integritas dan penerapan prinsip kehati-hatian.

## **BAB II**

### **RENCANA KINERJA**

Pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Purwakarta telah disusun berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Tahun 2025-2029. Kantor Pusat DJKN menetapkan target kinerja KPKNL Purwakarta Tahun 2025 yang dituangkan dalam Kontrak Kinerja dan dijabarkan dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU).

#### **A. Rencana Strategis**

##### **1. Misi**

Misi KPKNL Purwakarta adalah:

- 1) Mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial.
- 2) Mewujudkan layanan penilaian dan advisori yang profesional dan relevan untuk kepentingan negara.
- 3) Mewujudkan layanan lelang yang modern dan terpercaya untuk mendukung perekonomian nasional dan penegakan hukum
- 4) Mewujudkan pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif untuk mewujudkan layanan prima dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu.

##### **2. Tujuan**

KPKNL Purwakarta mempunyai tujuan organisasi yakni mampu menjadi pengelola kekayaan negara, piutang negara, dan lelang yang bertanggungjawab, profesional, dan dipercaya masyarakat pengguna jasa di wilayah kerja KPKNL Purwakarta.

##### **3. Sasaran**

Sasaran yang hendak dituju KPKNL Purwakarta adalah :

- 1) Pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan investasi yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial.
- 2) Layanan penilaian dan advisori yang profesional dan relevan.
- 3) Layanan lelang yang modern dan terpercaya.
- 4) Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif.

##### **4. Kebijakan**

Kebijakan adalah implementasi dari tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Kebijakan-kebijakan KPKNL Purwakarta dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran adalah:

- 1) Meningkatkan dan mengoptimalkan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan.
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan melakukan monitoring pelaksanaan diklat wajib, mengajukan diklat yang sesuai dengan tugas dan fungsi untuk meningkatkan *hard competency*.
- 3) Menerapkan standarisasi kerja yang berbasis pada integritas, ketulusan dan komitmen.
- 4) Menerapkan percepatan proses di bidang pengurusan piutang negara, lelang, kekayaan negara dan penilaian.
- 5) Menerapkan sistem pelayanan di bidang pengurusan piutang negara, lelang, kekayaan negara dan penilaian yang berbasis pada teknologi informasi.
- 6) Meningkatkan pelayanan di bidang hukum dan informasi yang meliputi percepatan proses penyelesaian perkara di pengadilan (litigasi) dan pemberian keterangan atau informasi kepada pihak terkait.

## 5. Program Kerja

Program kerja yang ditetapkan KPKNL Purwakarta tidak terlepas dari kebijakan yang telah diambil dan menjadi acuan bagi pencapaian tujuan dan sasaran. Program kerja KPKNL Purwakarta meliputi program kerja yang terurai kedalam program kerja masing-masing unit kerja. Berikut Program Kerja KPKNL Purwakarta.

- **Pelayanan di Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara**
  - a. Memberikan pelayanan prima dengan memberikan pengarahan dan perbantuan optimal dalam implementasi program SIMAN;
  - b. Mempercepat proses permohonan utilisasi dengan tidak mengurangi kecermatan dan kelengkapan berkas permohonan;
  - c. Mengelola kekayaan negara dengan efektif dan efisien;
  - d. Sinergi dengan Satuan Kerja dan Badan Pertanahan Nasional dalam rangka penyelesaian pensertipikatan BMN berupa tanah;
  - e. Menyampaikan laporan yang cepat dan akurat.
- **Pelayanan di bidang Lelang**
  - a. Memberikan pelayanan yang prima kepada pengguna jasa lelang;
  - b. Memberikan konsultasi kepada *stakeholder* tentang peraturan, syarat dan prosedur lelang;
  - c. Melaksanakan lelang online secara optimal;
  - d. Mempercepat proses penyelesaian Risaiah Lelang baik minuta, kutipan maupun salinan tepat waktu;
  - e. Meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan pemohon lelang;
  - f. Menyampaikan laporan yang cepat dan akurat.
- **Pelayanan di Bidang Pengurusan Piutang Negara**

- a. Mempercepat proses pengurusan Piutang Negara untuk berkas kasus Piutang Negara yang baru diserahkan;
  - b. Melakukan kegiatan bersifat persuasif guna menggugah kesadaran debitur agar mau mengangsur hutang mengingat kegiatan eksekusi sudah tidak dapat dilakukan;
  - c. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan penyerah piutang dan pihak-pihak terkait;
  - d. Menyampaikan laporan yang benar, cepat dan akurat.
- **Pelayanan di Bidang Penilaian**
    - a. Memberikan layanan penilaian yang aktif dan solutif;
    - b. Mempercepat penyelesaian laporan penilaian yang berkualitas;
    - c. Mewujudkan pelaksanaan penilaian yang akuntabel yang tercermin melalui ketergunaan hasil penilaian dalam Keputusan Pengelolaan BMN.
  - **Pelayanan di Bidang Hukum dan Informasi**
    - a. Melaksanakan tugas dan fungsi dalam bidang Bendahara Penerimaan secara optimal
    - b. Memberikan pelayanan yang optimal dalam setiap permohonan verifikasi jumlah hutang dalam rangka penerbitan SPPNS, SPPNL dan PSBDT;
    - c. Monitoring dan evaluasi kepatuhan dan layanan hukum yang efektif;
    - d. Memanfaatkan sistem informasi yang terintegrasi;
    - e. Menerapkan aplikasi Sibankum;
    - f. Menyampaikan laporan yang cepat dan akurat;
  - **Pelayanan di Bidang Umum**
    - a. Memberikan pelayanan yang optimal kepada seluruh unit kerja KPKNL Purwakarta dengan memenuhi sarana dan prasarana yang dibutuhkan secara maksimal;
    - b. Memberikan dorongan pembentukan SDM yang berintegrasi dan berkompotensi tinggi;
    - c. Mengelola anggaran dengan optimal;
    - d. Menyampaikan laporan yang cepat dan akurat;

## **B. Penetapan Kinerja**

### **1. Perjanjian Kinerja**

Mampu menjadi pengelola kekayaan negara, piutang negara dan lelang bertanggung jawab, profesional dan dipercaya masyarakat di wilayah kerja KPKNL Purwakarta merupakan misi KPKNL Purwakarta. Untuk mewujudkan misi tersebut, dibuatlah perjanjian kinerja yang disepakati antara Kepala Kanwil DJKN Jawa Barat selaku pejabat tertinggi di wilayah kerja Provinsi Jawa Barat dengan Kepala KPKNL

Purwakarta. Dalam perjanjian kinerja tersebut memuat butir-butir yang telah ditetapkan dalam garis besar peta strategi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, yaitu:

- 1). Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya;
- 2). Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal;
- 3). Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa;
- 4). Penerapan tata kelola aset yang efektif;
- 5). Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif;
- 6). Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif;
- 7). Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif;
- 8). Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif.

## **2. Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Berikut Indikator Kinerja Utama (IKU) KPKNL Purwakarta:

- 1). Indeks integritas;
- 2). Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang;
- 3). Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara;
- 4). Persentase realisasi pokok lelang;
- 5). Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara;
- 6). Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi;
- 7). Indeks kepuasan pengguna layanan;
- 8). Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan;
- 9). Persentase evaluasi kinerja BMN;
- 10). Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara;
- 11). Tingkat kualitas layanan penilaian;
- 12). Persentase produktivitas lelang;
- 13). Indeks kualitas kinerja anggaran;
- 14). Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa;
- 15). Persentase pengembangan kompetensi pegawai;
- 16). Indeks penanganan permasalahan hukum;
- 17). Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID);
- 18). Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko.

**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2025  
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG  
PURWAKARTA  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya	1a-CP Indeks integritas	100
		1b-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp14,9M)
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	2a-CP Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
		2b-CP Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp321,5M)
		2c-CP Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp100jt)
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	3a-CP Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74
		3b-N Indeks kepuasan pengguna layanan	77
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4a-CP Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
		4b-CP Persentase evaluasi kinerja BMN	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a-CP Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%
		5b-CP Tingkat kualitas layanan penilaian	70%
		5c-CP Persentase produktivitas lelang	80%
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	6a-CP Indeks kualitas kinerja anggaran	100
		6b-N Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100
		6c-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7a-CP Indeks penanganan permasalahan hukum	100
		7b-N Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	8a-N Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80

**Program/Kegiatan 2025**

Program:

Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko

Kegiatan

**Anggaran**

Rp424,151,000

*Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025*



1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp14,668,000
2. Pengelolaan Aset	Rp409,483,000
Program:	
Dukungan Manajemen	Rp3,222,842,000
Kegiatan	
1. Legislasi dan Litigasi	Rp35,766,000
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp3,129,066,000
3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp36,962,000
4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp21,048,000

Kab. Purwakarta, 30 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal  
Kekayaan Negara Jawa Barat



Ditandatangani Secara Elektronik  
Tugas Agus Priyo Waluyo

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan  
Lelang Purwakarta



Ditandatangani Secara Elektronik  
Harmani Sri Mumpuni

*Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025*



**RINCIAN TARGET KINERJA**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG**  
**PURWAKARTA**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2025**

Kode SS/IKU	SS/IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
<b>1</b>	<b>Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya</b>							
1a-CP	Indeks integritas	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp14,9 M)
<b>2</b>	<b>Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal</b>							
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp321,5 M)
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp100jt)
<b>3</b>	<b>Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa</b>							
3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	74	74	74	74	74	74
3b-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	77	77	77	77	77	77
<b>4</b>	<b>Penerapan tata kelola aset yang efektif</b>							
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
<b>5</b>	<b>Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif</b>							
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%
<b>6</b>	<b>Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif</b>							
6a-CP	Indeks kualitas kinerja	100	100	100	100	100	100	100



Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
	anggaran							
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	100	100	100	100	100	100
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%
<b>7</b>	<b>Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif</b>							
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	100	100	100	100	100	100
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
<b>8</b>	<b>Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif</b>							
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	80	80	80	80	80	80

Kab. Purwakarta, 30 Januari 2025

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan  
Lelang Purwakarta



Ditandatangani Secara Elektronik  
Harmani Sri Mumpuni



**C. Addendum Kontrak Kinerja**

Tidak ada addendum kontrak kinerja pada tahun 2025.

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja KPKNL Purwakarta yang dituangkan dalam Nilai Kinerja Organisasi (NKO) mencatat kenaikan dari tahun sebelumnya. Capaian pada tahun 2025 sebesar **114,27%** dibandingkan tahun 2024 sebesar **110,79%**. Perbandingan Nilai Kinerja Organisasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta dalam 5 (lima) tahun adalah, sebagai berikut:



Pada Tahun Anggaran 2025, KPKNL Purwakarta secara umum telah mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan yaitu dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar **114,27%** dengan catatan terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang masih sedikit belum mencapai target dan berindikator “Kuning”, yaitu IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang. Lebih jelasnya di bawah ini adalah gambaran tentang perbandingan antara target dan realisasi capaian kinerja tahun 2025.

**NILAI KINERJA ORGANISASI  
KPKNL PURWAKARTA  
Periode s.d Triwulan IV 2025**

Kode	IKU	Polarisasi	V/C	Target	Realisasi	Bobot IKU	Bobot Tertimbang IKU	Indeks Capaian IKU	Indeks Max. 120	Nilai Sasaran Strategis	Nilai Perspective
				s.d Triwulan IV	s.d Triwulan IV						
<b>Stakeholder Perspective (30%)</b>											
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112,66
1a-CP	Indeks Integritas	Max	P/M	100,00	105,32	14,00%	50,00%	105,32	105,32	52,66	112,66
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	Max	P/M	100,00%	140,30%	14,00%	50,00%	140,30	120,00	60,00	
<b>Customer Perspective (20%)</b>											
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101,78
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	Max	P/L	100,00%	103,33%	19,00%	36,54%	103,33	103,33	37,76	110,89
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	Max	P/L	100,00%	86,80%	19,00%	36,54%	86,80	86,80	31,72	
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	Max	P/M	100,00%	160,49%	14,00%	26,92%	160,49	120,00	32,31	
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,00
3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	Max	P/M	74,00	95,81	14,00%	50,00%	129,48	120,00	60,00	114,40
3b-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	Max	P/M	77,00	96,80	14,00%	50,00%	125,71	120,00	60,00	
<b>Internal Process Perspective (25%)</b>											
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108,79
4a-CP	Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan	Max	P/M	100,0%	106,03%	14,00%	50,00%	106,03	106,03	53,02	114,40
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	Max	P/M	100,0%	111,55%	14,00%	50,00%	111,55	111,55	55,77	
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara	Max	P/M	100,0%	202,22%	14,00%	33,33%	202,22	120,00	40,00	118,77
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	Max	P/M	70,0%	110,66%	14,00%	33,33%	158,09	120,00	40,00	
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	Max	P/M	80,0%	170,17%	14,00%	33,33%	212,71	120,00	40,00	
<b>Learning and Growth Perspective (25%)</b>											
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118,83
6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	Max	P/M	100,00	120,00	14,00%	33,33%	120,00	120,00	40,00	118,77
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	Max	P/M	100,00	120,00	14,00%	33,33%	120,00	120,00	40,00	
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	Max	P/M	80,00%	93,20%	14,00%	33,33%	116,50	116,50	38,83	
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117,48
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	Max	P/M	100,00	114,97	14,00%	50,00%	114,97	114,97	57,48	118,77
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	Max	P/M	80,00	112,00	14,00%	50,00%	140,00	120,00	60,00	
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	-	-	-	120%	-	-	-	-	-	120,00
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	Max	P/M	80,00	98,92	14,00%	100,00%	123,66	120,00	120,00	118,77
<b>NKO</b>											<b>114,27</b>

## 1. Indeks Integritas

Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu insititusi dengan mengkombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi.

IKU Indeks Integritas bertujuan untuk Menilai tingkat integritas di lingkungan Kementerian Keuangan berdasarkan persepsi dan pengalaman dari pegawai (responden internal) dan pengguna layanan kemenkeu (responden eksternal).

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Integritas melampaui target tahun 2025 sebesar 100 dalam indeksasi skala 1-100, yaitu mendapat skor indeks sebesar 105,32.

KPKNL Purwakarta	SS-1 Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Proaktif, Adaptif dan Terpercaya							
	1a-CP Indeks Integritas							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/Kp
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLK
Realisasi	120	120	120	120	120	105,32	105,32	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	105,32%	105,32%	

**a. Isu Utama dan Implikasi**

Dalam Rangka Efisiensi, pada tahun 2025, KPK tidak melaksanakan SPI sehingga tahun 2025 penilaian Indeks Integritas dilakukan melalui Tindak Lanjut Survei Penilaian Integritas tahun 2024. Pada Triwulan IV 2025 yang dilakukan yaitu Laporan Akhir Tahun dan campaign Hakordia.

Implikasinya:

1. Setiap Unit harus melaksanakan rencana aksi dan tindak lanjut hasil SPI tahun 2024 sesuai matriks yang ditetapkan Sekretariat DJKN
2. Diperlukan penguatan monitoring dan evaluasi internal untuk memastikan konsistensi dan efektivitas tindak lanjut.

**b. Akar Masalah**

Perlu untuk meningkatkan peran lini pertama dan kedua dalam rangka pencegahan, deteksi, dan monev pelanggaran disiplin termasuk integritas pegawai.

**c. Tindakan yang telah dilaksanakan**

- Telah dibuat unit pengendalian gratifikasi di lingkungan Kanwil DJKN Jawa Barat;
- Membuat pelaporan terkait gratifikasi, identifikasi titik rawan;
- Sosialisasi tolak dan lapor antigratifikasi/antikorupsi kepada stakeholder oleh kepala kantor;
- Campaign terkait anti korupsi pada media sosial IG KPKNL Purwakarta;
- Telah Melakukan identifikasi titik rawan (Risk Profiling) praktik gratifikasi dan menyampaikannya kepada Kanwil DJKN Jawa Barat;
- Campaign/Internalisasi pencegahan pelanggaran disiplin di lingkungan DJKN.

**d. Rekomendasi Rencana Aksi**

- Melakukan koordinasi dan sosialisasi terkait dengan Integritas kepada pihak Internal (pegawai, PPNPN, honorer, Satpam) KPKNL Purwakarta;
- Melakukan koordinasi dan sosialisasi terkait dengan Integritas kepada pihak eksternal pengguna layanan di wilayah kerja KPKNL Purwakarta;

- Menayangkan sosialisasi terkait Integritas di medsos KPKNL seperti IG dan FB secara periodik.

## 2. Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang

Capaian IKU Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang Realisasi yang terdiri dari PNBPN BMN, PNBPN Piutang Negara, dan PNBPN Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta Tahun 2025 sebesar **Rp20.978.683.636,00** atau sebesar **140,30%** dari total target sebesar **Rp14.952.700.000,00**.

Apabila dirinci, terdapat satu komponen IKU yang tidak mencapai target tahunan, yaitu PNBPN dari biaya administrasi pengurusan Piutang Negara (PN). Hal ini disebabkan

	Target PNBPN Tahun 2025	Realisasi	Capaian Tahunan
Aset	7.550.000.000	10.630.535.162	140,80%
PN	6.000.000	2.448.728	40,81%
Lelang	7.396.700.000	10.345.699.746	139,87%
Total	14.952.700.000	20.978.683.636	140,30%

KPKNL Purwakarta	SS-1 Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Proaktif, Adaptif dan Terpercaya							
	1b-CP Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/Kp
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLK
Realisasi	244,35%	198,16%	198,16%	139,42%	139,42%	140,30%	140,30%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

### a. Isu Utama dan Implikasi

Isu Utama:

- Realisasi PNBPN BMN diperoleh dari pemanfaatan BMN, lelang barang rampasan, dan lelang kertas suara
- Realisasi PNBPN lelang diperoleh dari lelang hak tanggungan dan BMN.
- Realisasi PNBPN PN diperoleh dari pengurusan PN

Implikasi:

- Realisasi PNBPN BMN telah sesuai dengan trajectory
- Realisasi PNBPN lelang telah sesuai dengan trajectory
- Realisasi PNBPN PN jauh dari sesuai dengan trajectory

### b. Akar Masalah

- Penggalan potensi dari pengelolaan BMN untuk proyeksi triwulan I 2025

- Jumlah permohonan lelang HT yang meningkat dengan obyek lelang yang kurang marketable
- Debitur membutuhkan waktu untuk mencari ketersediaan dana untuk pembayaran hutang, sehingga mekanisme angsuran terbuka menjadi opsi

**c. Tindakan yang telah dilaksanakan**

Seksi PKN:

- Melakukan koordinasi dengan para satker terkait pemanfaatan aset
- Melakukan percepatan penyelesaian proses persetujuan pemanfaatan sampai dengan mendorong percepatan terbitnya perjanjian sewa dan pembayaran sewa.
- Melakukan Koordinasi dengan satker terkait penerimaan yang berasal dari BLU.

Seksi PN:

- Melakukan penagihan potensial terhadap debitur potensial seperti debitur a.n. Bowo RSHS sebesar Rp58 juta, BPJS Nurul Barokah, Mitra Usaha dan Raputri
- Melakukan penagihan dengan menyampaikan surat paksa;
- Intensifikasi penagihan secara berkala terhadap debitur yang telah diperoleh nomor handphone/rumah;
- Melakukan aset tracing debitur

Lelang:

- Melakukan sosialisasi aplikasi lelang versi 2 kepada pemohon lelang
- Membuka saluran informasi untuk menerima masukan terkait aplikasi versi 2
- Menyampaikan usulan perbaikan system pada aplikasi versi 2 melalui saluran yang disediakan oleh direktorat TSI dan Direktorat Lelang
- Melakukan koordinasi dengan pemohon lelang khususnya dengan nominal besar

**d. Rekomendasi Rencana Aksi**

- Melakukan koordinasi bersama satker terkait penggalan potensi PNBPN dari pengelolaan BMN baik pemanfaatan maupun pemindahtanganan BMN.
- Melakukan monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN yang telah diterbitkan.
- Melakukan penagihan potensial terhadap debitur potensial.
- Melakukan penagihan dengan menyampaikan surat paksa;
- Intensifikasi penagihan secara berkala terhadap debitur yang telah diperoleh nomor handphone/rumah;
- Melakukan monitoring implementasi aplikasi lelang versi 2
- Memberikan masukan perbaikan aplikasi lelang versi 2
- Melakukan koordinasi dengan pemohon lelang untuk meningkatkan capaian PNBPN Lelang

### 3. Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara

IKU ini mengukur peningkatan persentase kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK yang pada tahun sebelumnya telah diukur, melalui:

1. Optimalisasi penggunaan aset, yaitu utilisasi aset dalam rangka penyelenggaraan operasional sesuai dengan tugas dan fungsi unit.
2. Optimalisasi pemanfaatan aset, yaitu utilisasi atas suatu aset atau bagian dari aset yang tidak digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi unit.
3. Tingkat pengawasan atas optimalisasi pengelolaan aset negara:
  - a. Tingkat penyelesaian policy recommendation terkait optimalisasi tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK (15%);
  - b. Tingkat ketepatan waktu penyelesaian policy recommendation (70%);
  - c. Persentase monitoring atas kegiatan optimalisasi terhadap NUP (15%).

Target IKU Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara pada KPKNL Purwakarta tahun 2025 secara keseluruhan ditetapkan sebesar **100%**. Dari target tersebut, dapat direalisasikan mencapai target dan dihitung capaian sebesar **103,33%**, dengan rincian sebagai berikut.

KPKNL	SS-2 Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal							
Purwakarta	2a-CP Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/Kp
Target	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	200,00%	122,22%	122,22%	97,28%	97,28%	103,33%	103,33%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	103,33%	103,33%	

#### a. Isu Utama dan Implikasi

Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara, terdiri dari 2 komponen:

1. Tingkat optimalisasi dari mekanisme penggunaan 13
2. Tingkat optimalisasi dari mekanisme pemanfaatan 3

Realisasi IKU (%) = [ ((Total Tingkat Optimalisasi dari Mekanisme Penggunaan) + (Total Tingkat Optimalisasi dari Mekanisme Pemanfaatan)) / 3 ] x 100%

Target aset relatif sulit dioptimalkan penggunaan maupun pemanfaatannya. Target 16, dapat terealisasi 13 penggunaan dan 3 pemanfaatan.

#### b. Akar Masalah

- Efisiensi K/L menyebabkan Satker tidak dapat merealisasikan anggaran yang ada untuk optimalisasi Aset BMN. Terdapat aset pada KPP Madya Karawang sebanyak 1 NUP dan KPP Pratama Karawang sebanyak 2 NUP. Gedung kantor yang dijadikan Gudang dan ada juga sebagai tempat tinggal. Gedung ini memang sudah rusak tidak layak untuk dijadikan kantor. Pengguna Barang keberatan untuk

perubahan dari Gedung kantor menjadi Gudang atau pun tempat tinggal.

- Satuan kerja yang belum mendapatkan sosialisasi terkait optimalisasi Barang Milik Negara.
- Satuan Kerja belum memahami cara mengoptimalkan Barang Milik Negara.

**c. Tindakan yang telah dilaksanakan**

- Melakukan koordinasi dengan Satker yang menjadi target.
- Pengumpulan data dan informasi baik melalui peninjauan lapangan maupun on desk.
- Berkoordinasi secara intensif dengan satker terkait konfirmasi data dan informasi BMN serta upaya optimalisasi BMN.

**d. Rekomendasi Rencana Aksi**

- Penyusunan dan penyampaian laporan sesuai ketentuan kepada Kanwil DJKN Jawa Barat.
- Mendorong kendali atas optimalisasi ini berada 50% di KPKNL dan 50% di satker.

**4. Persentase Realisasi Pokok Lelang**

Target Realisasi Pokok Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta tahun 2025 secara keseluruhan ditetapkan sebesar **Rp321.567.500.000,00**. Dari target tersebut, dapat direalisasikan sebesar **Rp279.131.160.390,00** atau sebesar **86,80%** dari target. Rincian capaian tersebut, sebagai berikut:

KPKNL	SS-2 Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal							
	Purwakarta 2b-CP 4. Persentase Realisasi Pokok Lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/Kp
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLK
Realisasi	128,86%	99,27%	99,27%	77,11%	77,11%	86,80%	86,80%	
Capaian	120%	99,27%	99,27%	77,11%	77,11%	86,80%	86,80%	

Uraian IKU Tahun 2025	Target IKU Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Capaian
<b>Persentase hasil lelang (Pokok Lelang)</b>	321.567.500.000	279.131.160.390	86,80%
Pokok Lelang Kelas I	200.000.000.000	204.046.183.090	102,02%
Pokok Lelang Pegadaian	121.567.500.000	75.084.977.300	61,76%

**a. Isu Utama dan Implikasi**

- Hal yang menyebabkan capaian belum maksimal yaitu tidak maksimalnya realisasi pokok lelang dari lelang Pegadaian.

**b. Akar Masalah**

- Lelang yang laku masih relatif untuk lelang dengan nilai limit kecil, sedangkan lelang dengan nilai limit nominal besar masih TAP dan tidak terdapat lelang booming pada tahun 2025 ini.
- Adanya lelang besi tua dengan peminat lebih dari 50 orang namun tak satu pun yang melakukan penawaran. Serta adanya pengaduan terkait kongsi para peserta lelang untuk tidak melakukan penawaran, mengakibatkan lelang yang berpotensi laku menjadi tidak ada penawaran (TAP).
- Lelang pegadaian semakin berkurang, seiring dengan banyaknya pegadaian swasta dan tingginya pelunasan gadai tepat waktu pada kantor Pegadaian.

**c. Tindakan yang telah dilaksanakan**

- Melakukan sosialisasi aplikasi lelang versi 2 kepada pemohon lelang.
- Membuka saluran informasi untuk menerima masukan terkait aplikasi versi 2.
- Menyampaikan usulan perbaikan system pada aplikasi versi 2 melalui saluran yang disediakan oleh direktorat TSI dan Direktorat Lelang.
- Melakukan koordinasi dengan pemohon lelang khususnya dengan nominal besar agar dapat meningkatkan capaian Pokok lelang.

**d. Rekomendasi Rencana Aksi**

- Melakukan monitoring implementasi aplikasi lelang versi 2.
- Memberikan masukan perbaikan aplikasi lelang versi 2.
- Melakukan koordinasi dengan pemohon lelang untuk meningkatkan capaian Pokok lelang.
- Menayangkan obyek lelang di medsos KPKNL seperti IG dan FB secara periodik dan berkelanjutan.

**5. Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara**

Target penurunan saldo piutang Negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta Tahun 2025 sebesar **100%** dari **Rp100.000.000,00**. Dari target tersebut dapat direalisasikan penurunan saldo piutang Negara sebesar **Rp160.494.486,00** dengan persentase nilai realisasi sebesar **160,49%** dari target.

KPKNL	SS.2 Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang Optimal							
Purwakarta	3c-CP Persentase Penurunan Saldo Piutang Negara							
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/Kp
Target	100	100	100	100	100	100	100%	Max/TLK
Realisasi	117,29%	243,90%	243,90%	126,86%	126,86%	160,49%	160,49%	
Capaian	117,29%	120%	120%	120%	120%	120,00%	120,00%	

#### a. Isu Utama dan Implikasi

- Kriteria pengakuan capaian atas IKU yaitu untuk seluruh berkas piutang macet terdiri dari komponen:
  1. PNDS/Piutang Negara Dapat Disetor (Angsuran/Pembayaran (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat) atau Pelunasan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
  2. Penarikan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
  3. Pengembalian (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
  4. PSBDT (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
  5. Koreksi karena kekeliruan pencatatan dari Penyerah Piutang atau KPKNL.
- Seksi PN akan terus meningkatkan pengurusan piutang negara sampai optimal.

#### b. Akar Masalah

Sampai dengan tahap ini, capaian penurunan saldo PN masih belum menemui kendala, namun dalam BKPN yang ada, terdapat banyak debitur dengan nominal rendah yang tidak mengakui hutang dan juga tidak didukung barang jaminan, sehingga upaya paksa untuk memberikan *shock therapy* menjadi tidak efektif, sehingga BKPN tersebut menjadi sulit penyelesaiannya.

#### c. Tindakan yang telah dilaksanakan

- Melakukan penagihan dengan menyampaikan surat paksa;
- Intensifikasi penagihan secara berkala terhadap debitur yang telah diperoleh nomor handphone/rumah.

#### d. Rekomendasi Rencana Aksi

- Intensifikasi komunikasi dengan stakeholder dan debitur;
- Penagihan berdasarkan clustering nominal piutang debitur untuk mengantisipasi outstanding.

### 6. Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi

IKU efektivitas edukasi dan komunikasi dihitung berdasarkan indeksasi dengan target sebesar 74 dalam indeks skala 100. Dari target tersebut, dapat dicapai realisasi

sebesar 95,81 di akhir tahun 2025, dengan persentase capaian sebesar 129% atau maksimal sebesar 120% dari target.

KPKNL Purwakarta	SS-3 Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Jasa							
	3a-CP Indeks Efektivitas edukasi dan komunikasi							
T/R	Q1	Q2	SM I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	74	74	74	74	74	74	74	Max/AVG
Realisasi	77	86,63	86,625	97,61	97,61	95,81	95,81	
Capaian	104%	117%	117%	120%	120%	120%	120%	

**a. Isu Utama dan Implikasi**

	Target Edukom 2025	Realisasi	Capaian Tahunan
Total	74	95,81	129%
PL 1	74	98	133%
PN	74	94	126%

- IKU ini di KPKNL terdiri dari 2 komponen antara lain: Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi Jafung Pelelang dan Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi Pengelolaan Piutang Negara.
- Seksi Piutang Negara:  
Capaian IKU Edukom telah dicapai dengan menyampaikan KAK kepada Setditjen dan kegiatan edukasi dan komunikasi Triwulan I Tahun 2025 telah dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2025.
- Lelang:  
Capaian IKU Edukom telah dicapai dengan mengirim materi/rencana pelaksanaan edukasi pada bulan Maret 2025.

**b. Akar Masalah**

- Q4 ditargetkan pencapaian maksimal.

**c. Tindakan yang telah dilaksanakan**

- Melakukan penagihan dengan menyampaikan surat paksa.
- Intensifikasi penagihan secara berkala terhadap debitur yang telah diperoleh nomor handphone/rumah.

**d. Rekomendasi Rencana Aksi**

- Intensifikasi komunikasi dengan stakeholder dan debitur;
- Penagihan berdasarkan clustering nominal piutang debitur untuk mengantisipasi outstanding.

## 7. Indeks kepuasan pengguna layanan

Indeks kepuasan pengguna layanan merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kepuasan pengguna layanan atas layanan yang diberikan. IKU ini mengukur survei kepuasan pengguna layanan DJKN dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Pelaksanaan survei dikoordinasikan oleh Bidang PKN dan KPKNL. Hasil survei kepuasan pengguna layanan diukur dengan indeksasi. Komponen yang diukur antara lain, sebagai berikut:

- 1) Persyaratan
- 2) Sistem, Mekanisme, Prosedur
- 3) Waktu Penyelesaian
- 4) Biaya/Tarif
- 5) Produk Layanan
- 6) Kompetensi Pelaksana
- 7) Perilaku Pelaksana
- 8) Sarana Prasarana
- 9) Sarana Pengaduan.

Target indeks kepuasan pengguna layanan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta pada tahun 2025 sebesar **77**. Dari target tersebut, dapat terealisasi sebesar **96,80** atau dengan persentase capaian sebesar **125,71%** atau persentase capaian maksimal sebesar **120%** dibandingkan target.

KPKNL Purwakarta	SS-3 Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Jasa							
	3b-N Indeks Kepuasan Pengguna Layanan							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/Kp
Target	77	77	77	77	77	77	77	Max/AVG
Realisasi	93,78	97,40	97,4	98,40	98,4	96,80	96,80	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

### a. Isu Utama dan Implikasi

Stakeholder pada umumnya memberikan nilai maksimal, sehingga realisasi s.d. Triwulan IV untuk IKPL yaitu sebesar 96,80 atau berada di Mutu Pelayanan "A" atau "Baik". Implikasi yang dirasakan reputasi KPKNL Purwakarta terjaga dengan baik.

### b. Akar Masalah

- Tingkat pemahaman terhadap hal-hal non-teknis yang tidak sama di antara petugas layanan.
- Layanan yang diberikan tidak relevan atau tidak sesuai harapan pengguna.

**c. Tindakan yang telah dilaksanakan**

- Menyusun kuesioner survei layanan untuk mengetahui tingkat kepuasan stakeholders terhadap pelayanan KPKNL Purwakarta.
- Menyebarkan kuesioner survei kepuasan kepada responden pengguna layanan.

**d. Rekomendasi Rencana Aksi**

- Melakukan evaluasi dan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan pengguna layanan.

**8. Persentase Barang Milik Negara (BMN) berupa Tanah yang disertipikatkan**

Target persentase bidang tanah BMN yang disertipikatkan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta tahun 2025 sebesar **100%** dari sebanyak **348** bidang tanah yang harus diselesaikan. Dari target tersebut, dapat direalisasikan sebanyak **369** bidang tanah atau dengan persentase mencapai **106,03%** dari target.

KPKNL Purwakarta	SS.4 Penerapan tata kelola aset yang efektif							
	4a-CP Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertipikatkan							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/Kp
Target	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	178%	183%	183%	133%	133%	106,03%	106,03%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	106%	106%	

**a. Isu Utama dan Implikasi**

- Sampai dengan Q4 2025, capaian persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan sebesar 106,03%.
- KPKNL Purwakarta mempunyai target sebanyak 348 bidang tanah dengan rincian, yaitu: kategori K1 sebanyak 78 bidang terealisasi sebanyak 89 bidang, K2 sebanyak 4 bidang tidak ada realisasi, K3 sebanyak 266 bidang dapat terealisasi sebanyak 239 bidang, dan terdapat realisasi penyelesaian kategori K4 sebanyak 41 bidang dari yang sebelumnya tidak diberi target.

**b. Akar Masalah**

- Dari target 348 bidang tanah, 75% adalah target bidang Subordinasi, sehingga memiliki tingkat kendali aksi yang rendah dalam pencapaian targetnya serta menyulitkan dalam koordinasi karena satuan kerja berada di luar kewenangan KPKNL Purwakarta.
- Adanya penghematan anggaran sertifikasi BMN Tanah pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, menyebabkan terlambatnya proses penyelesaian pensertipikatan.

**c. Tindakan yang telah dilaksanakan**

- Koordinasi dengan Satker terkait target sertipikasi BMN berupa Tanah tahun 2025.
- Berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan terkait estimasi jumlah bidang yang akan diusulkan pensertipikatan BMN.
- Menyampaikan kepada Kanwil DJKN Jawa Barat terkait hasil koordinasi sertipikasi dengan Satker dan Kantor Pertanahan.

**d. Rekomendasi Rencana Aksi**

- Meminta kepada satuan kerja pemilik BMN Tanah melalui untuk menyusun rencana kerja sertipikasi melalui jalur mandiri, salah satunya kepada Satker PJJN.

**9. Persentase Evaluasi Kinerja BMN**

Evaluasi kinerja BMN merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis.

Target persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta tahun 2025 terdiri dari target **194 NUP** BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dievaluasi kinerja dan disampaikan rekomendasi kepada satker serta target **5 paket rekomendasi** BMN tanah dan/atau bangunan yang rekomendasinya ditindaklanjuti oleh satker.

Dari target tersebut, dapat direalisasikan capaian IKU dengan perhitungan persentase capaian sebesar **111,59%** yang dirinci, sebagai berikut:

- sebanyak **200 NUP** BMN tanah dan/atau bangunan yang telah dievaluasi kinerjanya dan disampaikan rekomendasi kepada satker (target **194 NUP**);
- sebanyak **200 paket rekomendasi** BMN tanah dan/atau bangunan yang rekomendasinya ditindaklanjuti oleh satker (target **5 rekomendasi**).

KPKNL Purwakarta	SS.4 Penerapan tata kelola aset yang efektif							
	4b-CP Persentase Evaluasi Kinerja BMN							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/Kp
Target	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	120%	120%	120%	120%	120%	111,59%	111,59%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	111,6%	111,6%	

**1. Isu Utama dan Implikasi**

- Evaluasi kinerja BMN tahun 2025 telah dilaksanakan.

- Sampai dengan periode Q4 2025 telah dilakukan evaluasi kinerja BMN terhadap 200 NUP dan telah disampaikan rekomendasi sebanyak 200 paket, hal ini telah melampaui target evaluasi kinerja BMN periode 194 NUP evaluasi kinerja dan 5 paket rekomendasi.

## **2. Akar Masalah**

- Untuk memperoleh data terkait biaya pengelolaan BMN dari Satker pemilik BMN membutuhkan waktu yang tidak singkat.
- Jadwal survei evaluasi kinerja BMN sangat bergantung pada ketersediaan waktu dari Satker pemilik BMN, sehingga jadwalnya dapat berubah-ubah sewaktu-waktu.
- Terdapat penambahan prosedur penyampaian laporan pada tahun 2025 sehingga akan menambah waktu penyelesaian.

## **3. Tindakan yang telah dilaksanakan**

- Telah melakukan kegiatan survei lapangan pada Satker.
- Telah menyampaikan laporan evaluasi kinerja BMN.
- Melakukan koordinasi dengan satker terkait pelaksanaan evaluasi kinerja, meliputi pengumpulan data, kegiatan survei lapangan dan tindak lanjut hasil evaluasi kinerja BMN.

## **4. Rekomendasi Rencana Aksi**

- Melaksanakan evaluasi kinerja BMN sesuai ketentuan atas BMN yang ditargetkan di tahun 2026.
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut oleh Satker dari hasil evaluasi kinerja BMN.

## **10. Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara**

IKU Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) menggambarkan piutang negara yang telah diserahkan dan diurus oleh PUPN dapat diselesaikan atau telah optimal pengurusan berdasarkan UU Prp 49 Tahun 1960 jls. PP No. 28 Tahun 2022 jls. PMK 240/PMK.06/2016, dan penyelesaian BKPN yang tidak dapat diserahkan kepada PUPN telah dikelola secara optimal oleh Kementerian Negara/Lembaga berdasarkan PMK 163/PMK.06/2020, serta penyelesaian BKPN yang tidak dapat diserahkan kepada PUPN telah dikelola secara optimal oleh Pemerintah Daerah berdasarkan PMK 137/PMK.06/2022.

Komponen perhitungan Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Macet sebagai kriteria capaian IKU berupa:

1. Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Macet melalui PUPN yang menghasilkan penerimaan Negara (bobot komponen: 1,2)
  - a. Pelunasan berupa penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas (SPPNL);

- b. Penarikan berupa penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Selesai (SPPNS);
  - c. Koreksi Data (Berkas piutang macet telah diterbitkan SPPNL/SPPNS di tahun berjalan dan tahun sebelumnya yang belum tercatat).
2. Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Macet melalui PUPN Tidak Menghasilkan penerimaan Negara (bobot komponen: 1,1)
  - a. Pengembalian berupa penerbitan Surat Pengembalian Pengurusan Piutang Negara (SPPPN);
  - b. Pengurusan piutang macet telah optimal berupa penerbitan Pernyataan Piutang Sementara Belum Dapat Tertagih (PSBDT);
  - c. Koreksi Data (Berkas piutang macet telah diterbitkan SPPPN/PSBDT di tahun berjalan dan tahun sebelumnya yang belum tercatat).
3. Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Macet yang tidak dapat diserahkan ke PUPN telah optimal (bobot komponen: 1)
  - a. Berkas Piutang Macet pada K/L telah optimal berupa penerbitan Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal (PPNTO);
  - b. Berkas Piutang Macet pada Pemda telah optimal berupa penerbitan Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO);

yang terbit di tahun berjalan atau tahun sebelumnya serta belum tercatat di aplikasi focusPN. PPNTO dan PPDTO diupload pada aplikasi focusPN dan dapat diperhitungkan sebagai capaian setelah dilakukan review oleh Bidang PN Kanwil DJKN dan di validasi oleh Direktorat PKKN.

Target penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta tahun 2025 ditentukan dengan satuan indeksasi, yaitu sebesar **4,5**. Sampai dengan Q4 2025, telah direalisasikan penyelesaian dengan perhitungan capaian indeks sebesar **9,10** yang apabila dipersentasekan sebesar **202,22%** atau persentase capaian maksimal sebesar **120%** dari target. Adapun realisasi penyelesaian Berkas Piutang Macet, berasal dari komponen Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Macet melalui PUPN yang menghasilkan penerimaan Negara dan komponen Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Macet melalui PUPN Tidak Menghasilkan penerimaan Negara.

KPKNL Purwakarta	SS.5 Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
	5a-CP Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/Kp
Target	1	2	2	3	3	4,5	4,5	Max/TLK
Realisasi	110%	165%	165%	150%	150%	202%	202%	
Capaian	110%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

IKU	Uraian	Sampai dengan
		Triwulan IV
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara	
<b>a</b>	<b>Realisasi Raw Data (Realisasi x Bobot)</b>	<b>9,10</b>
	Jumlah Berkas Piutang Negara Diselesaikan Komponen 1 (Bobot = 1,2)	3
	Jumlah Berkas Piutang Negara Diselesaikan Kompoen 2 (Bobot = 1,1)	5
	Jumlah BKPN Diselesaikan Komponen 3 (Bobot = 1)	0
<b>b</b>	<b>Target Raw Data sesuai periode (TLK) BKPN</b>	5
<b>REALISASI IKU</b>		<b>202,22%</b>

**a. Isu Utama dan Implikasi**

- Sampai dengan Q4 2025, sebanyak **8 BKPN** yang telah dinyatakan selesai, terdiri dari **3** penyelesaian BKPN yang menghasilkan penerimaan negara dan **5** penyelesaian BKPN yang tidak menghasilkan penerimaan negara.
- Capaian IKU ini dapat direalisasikan dengan pengurusan penyelesaian piutang negara melalui pelunasan oleh debitur maupun penerbitan Pernyataan Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT).

**b. Akar Masalah**

- Terdapat beberapa Surat Paksa yang direncanakan akan dilakukan optimalisasi pengurusan yaitu penyampaian Surat Paksa kepada debitur pada tahun ini.
- Terdapat BKPN yang berumur cukup lama tanpa didukung barang jaminan, yang telah dilakukan tahap pengurusan secara maksimal.
- Terdapat debitur yang tidak mengakui adanya utang/jumlah utang dikarenakan adanya misinformasi dari penyerah piutang.

**c. Tindakan yang telah dilaksanakan**

- Melakukan penagihan secara langsung kepada debitur.
- Intensifikasi penagihan secara berkala terhadap debitur yang telah diperoleh kontakannya berupa nomor *handphone*/nomor telepon rumah.
- Konfirmasi keberadaan debitur maupun ahli waris kepada aparat pemerintahan desa setempat.
- Melaksanakan peningkatan tahap pengurusan piutang negara.

#### d. Rekomendasi Rencana Aksi

- Melakukan penagihan secara langsung kepada debitur dan intensifikasi penagihan.
- Meningkatkan koordinasi dengan penyerah piutang.
- Melakukan penelusuran terhadap debitur yang belum ditemukan maupun ahli warisnya.

### 11. Tingkat kualitas pelayanan penilaian

Pelayanan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional diukur melalui Layanan Penilaian yang Tepat Waktu, Basis Data yang Akurat dan Hasil Penilaian yang mencerminkan kondisi optimal.

Indikator Penilaian yang Akuntabel & Profesional:

#### 1. Norma Waktu Layanan Penilaian (Bobot 40%)

Dimulainya kegiatan penilaian diawali dengan surat/nota dinas masuk permohonan penilaian BMN; penyelesaian penilaian adalah terselesaikannya laporan penilaian dan disampaikan kepada pemohon; jumlah permohonan penilaian selesai adalah jumlah kegiatan penilaian yang dimulai dari Surat/nota dinas permohonan penilaian diterima sampai dengan laporan penilaian selesai dan disampaikan ke pemohon.

#### 2. Akurasi Data Layanan Penilaian (Bobot 30%)

Akurasi Data Layanan Penilaian mengukur tingkat kesesuaian basis data pada permohonan penilaian BMN yang diinput pada aplikasi satu kemenkeu dengan permohonan penilaian yang diinput pada aplikasi Sistem Informasi Penilaian (SIP).

#### 3. Nilai Hasil Kaji Ulang Laporan Penilaian (Bobot 30%)

Persentase jumlah Laporan Penilaian yang mendapat nilai hasil Kaji Ulang dengan nilai minimal 85. Target 2025 sebesar 80% dari total laporan penilaian yang dikaji ulang di SIP.

Target tingkat kualitas layanan penilaian pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta di tahun 2025 ditentukan dengan satuan persentase sebesar **70%**. Dari target tersebut, dapat direalisasikan capaian sebesar **110,66%** yang jika dipersentasekan sebesar **158,09%** dari target atau persentase capaian maksimal sebesar **120%** dari target.

KPKNL	SS.5 Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
	Purwakarta 5b-CP Tingkat kualitas layanan penilaian							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/Kp
Target	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	
Realisasi	99%	103,59%	103,59%	101,05%	101,05%	110,66%	110,66%	Max/AVG
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	

Capaian tersebut diperoleh dari perhitungan berdasarkan rincian Capaian dan Realisasi, sebagai berikut.

1. Komponen Norma Waktu Layanan Penilaian (40%)

- Rata-Rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian = 90

2. Komponen Akurasi Data Layanan Penilaian (30%)

- Jumlah Pelaksanaan Penilaian BMN yang telah diinput pada SIP = 12
- Jumlah Permohonan Penilaian BMN yang diterima pada Satu Kemenkeu/SIMAN = 14

3. Komponen Nilai Hasil Kaji Ulang (30%)

- Jumlah Laporan Penilaian yang mendapat hasil Kaji Ulang minimal 85 = 7
- Jumlah seluruh Laporan Penilaian yang sudah dilakukan Kaji Ulang = 7

SS	IKU	Uraian	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
	5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian				
	<b>a</b>	<b>Komponen Norma Waktu Layanan Penilaian (40%)</b>	<b>93,78%</b>	0,97	<b>57,78%</b>	<b>93,78%</b>
		Rata-Rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian	93,78	97,40	57,78	93,78
	<b>b</b>	<b>Komponen Akurasi Data Layanan Penilaian (30%)</b>	<b>85,71%</b>	1,00	<b>100,00%</b>	<b>192,00%</b>
		Jumlah Pelaksanaan Penilaian BMN yang telah diinput pada SIP	12	84,00	101	96
		Jumlah Permohonan Penilaian BMN yang diterima pada Satu Kemenkeu/SIMAN	14	38,00	101	50
	<b>c</b>	<b>Komponen Nilai Hasil Kaji Ulang (30%)</b>	<b>125,00%</b>	1,25	<b>142,86%</b>	<b>142,86%</b>
		% Jumlah Laporan Penilaian yang mendapat hasil Kaji Ulang minimal 85	100,00%	1,00	100,00%	100,00%
		Jumlah Laporan Penilaian yang mendapat hasil Kaji Ulang minimal 85	7	27,00	10	97
		Jumlah seluruh Laporan Penilaian yang sudah dilakukan Kaji Ulang	7	27,00	10	97
		% Target 2025	70,00%	0,70	70,00%	70,00%
		<b>REALISASI IKU</b>	<b>100,73%</b>	<b>103,6%</b>	<b>101,05%</b>	<b>110,66%</b>

**a. Isu Utama dan Implikasi**

- Sampai dengan Triwulan IV 2025, realisasi IKU tingkat kualitas layanan penilaian sebesar 110,66% dengan persentase capaian terhadap target sebesar 158,09%.
- Keterbatasan permodelan penilaian properti menyebabkan masih terdapat kendala dalam optimalisasi akurasi dan efisiensi penilaian.
- Penyelesaian permohonan penilaian belum dapat dilakukan dengan cepat, khususnya pada saat terdapat permohonan penilaian yang masuk secara bersamaan.

**b. Akar Masalah**

- Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99 Tahun 2024 tentang, bahwa pada saat ini pelaksanaan penilaian telah didorong untuk menggunakan aplikasi Sistem Informasi Penilaian (SIP), namun aplikasi SIP belum terintegrasi dengan aplikasi Satu Kemenkeu, sehingga tim penilai/penilai pemerintah masih harus

melaksanakan tahapan proses penilaian pada 2 aplikasi tersebut, maka membutuhkan waktu yang lebih untuk melakukan penyelesaian permohonan penilaian.

**c. Tindakan yang telah dilaksanakan**

- Mengingatkan pemohon agar menyampaikan permohonan penilaian melalui Nadine dan aplikasi SIP Penilaian.
- Melakukan penyelesaian laporan penilaian sesuai SOP yang berlaku.
- Menyampaikan permohonan kaji ulang kepada Kanwil DJKN Jawa Barat melalui Nadine dan Aplikasi SIP Penilaian.

**d. Rekomendasi Rencana Aksi**

- Memastikan permohonan penilaian yang disampaikan oleh pemohon dimasukkan melalui Nadine dan aplikasi SIP Penilaian.
- Memperhatikan tahapan SOP dan norma waktu penyelesaian laporan penilaian.
- Menyusun laporan penilaian sesuai Keputusan Dirjen Kekayaan Negara nomor KEP-29 tahun 2024 tentang standar laporan penilaian dan ketentuan teknis di bidang penilaian.
- Segera menyampaikan permohonan kaji ulang setelah laporan penilaian selesai.

**12. Persentase produktivitas lelang**

Produktivitas lelang dinilai dari seberapa tinggi intensitas frekuensi lelang yang laku terjual. Target persentase produktivitas lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta tahun 2025 ditetapkan dengan satuan persentase sebesar **100%** (dengan formula perhitungan dari komponen hasil pelaksanaan lelang oleh KPKNL (Pejabat Lelang Kelas I/Jabatan Fungsional Pelelang), Pejabat Lelang Kelas II dan Pegadaian. Dari target tersebut, diperoleh realisasi capaian sebesar **170,2%** dengan persentase capaian sebesar **170,2%** dari target atau persentase capaian maksimal **120%**.

KPKNL	SS.5 Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
Purwakarta	5c-CP Persentase Produktivitas Lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/Kp
Target	20%	40%	40%	70%	70%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	76,5%	83,55%	83,55%	113,90%	113,90%	170,2%	170,2%	
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	

**a. Isu Utama dan Implikasi**

- Produktivitas Lelang Hak Tanggungan dan Lelang Pailit masih rendah.

- Lelang barang tetap berupa tanah dan/atau bangunan memiliki produktivitas yang rendah.
- Dalam perhitungan capaian IKU Produktivitas Lelang, bobot untuk jenis Lelang Eksekusi Pasal 6 UU Hak Tanggungan, Lelang Eksekusi Harta Pailit dan Lelang Eksekusi Sitaan Pengadilan hanya memiliki bobot 5%.
- Implikasinya, IKU persentase produktivitas lelang dapat tetap tercapai karena tidak terlalu dipengaruhi oleh jenis Lelang Eksekusi Pasal 6 UU Hak Tanggungan, Lelang Eksekusi Harta Pailit dan Lelang Eksekusi Sitaan Pengadilan untuk Implikasi yang hanya memiliki bobot 5% dalam perhitungan capaian IKU.

**b. Akar Masalah**

- Harga limit lelang barang berupa tanah masih menggunakan nilai pasar sehingga calon pembeli masih menganggap harganya masih cenderung tinggi untuk konsekuensi dan risiko dari pembelian melalui lelang.
- Kondisi bangunan yang dilelang masih berpenghuni, sehingga memerlukan upaya pengosongan bagi pembeli.

**c. Tindakan yang telah dilaksanakan**

- Melakukan koordinasi dan penggalan potensi lelang ke Kejaksaan, Satker, Perbankan, di wilayah Purwakarta, Subang dan Karawang maupun ke Rumah BUMN dan pelaku UMKM Purwakarta.
- Menayangkan objek lelang di medsos KPKNL seperti IG dan FB secara periodik dan berkelanjutan.
- Sosialisasi pemanfaatan aplikasi lelang.go.id kepada masyarakat.
- Memprioritaskan pelaksanaan lelang untuk objek lelang yang memiliki potensi untuk laku.
- Koordinasi dengan pemohon lelang terutama terhadap barang objek lelang yang berpotensi dilakukan AYDA.

**d. Rekomendasi Rencana Aksi**

- Melakukan koordinasi dan penggalan potensi lelang baik ke perbankan, Pemda, Satker maupun Pelaku UMKM di wilayah Purwakarta, Subang, dan Karawang.
- Mempublikasikan melalui medsos terkait objek yang akan dilelang di KPKNL Purwakarta.
- Mensosialisasikan penggunaan website lelang.go.id ke pelaku UMKM dan masyarakat.
- Memberikan sosialisasi PMK 122 Tahun 2023 ke para *stake holder*.

### 13. Indeks kualitas kinerja anggaran

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Ruang lingkup perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 sebagaimana diubah dengan PMK 107 Tahun 2024 pasal 249 ayat (7). IKU ini bertujuan untuk mengukur kualitas dan kinerja pelaksanaan anggaran.

Nilai kinerja anggaran Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (5), merupakan hasil penjumlahan dari:

- a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- b. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Target Indeks kualitas kinerja anggaran Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta tahun 2025 ditetapkan sebesar **95,26** yang dapat direalisasikan dengan capaian maksimal sebesar **120%** dari target.

KPKNL	SS.6 Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif							
	Purwakarta 6a-CP Indeks Kualitas Kinerja Anggaran							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/Kp
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	120,00%	120,00%	120,00%	116,53%	116,53%	120,00%	120,00%	
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	116,53%	116,53%	120,00%	120,00%	

#### a. Isu Utama dan Implikasi

- Perhitungan Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKKPA) meliputi perhitungan terkait pelaksanaan anggaran yang mencakup Nilai evaluasi kinerja anggaran Kementerian Negara/Lembaga (SMART DJA) dan Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga (IKPA DJPB) yang ada pada unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai dengan regulasi nasional.
- Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan.
- Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.
- Pembukaan blokir anggaran khususnya pada belanja modal pembangunan rumah dinas pada triwulan III 2025 dimana realisasinya hanya memiliki tenggat waktu yang sangat singkat sampai akhir tahun anggaran.

- Pembangunan rumah dinas KPKNL Purwakarta dapat diselesaikan dengan tepat waktu dan optimal penyerapan anggarannya.
- Nilai IKPA sudah maksimal.

**b. Akar Masalah**

- Adanya perubahan terhadap rencana kegiatan yang akan dilaksanakan.
- Untuk lebih memaksimalkan nilai IKPA dan IKKPA pada akhir tahun dibutuhkan komitmen dari masing-masing seksi terutama seksi teknis dalam menyusun rencana kebutuhan penarikan dana bulanan dengan target realisasi.
- Pembukaan blokir anggaran khususnya pada belanja modal pembangunan rumah dinas pada triwulan III 2025 dimana realisasinya hanya memiliki tenggat waktu yang sangat singkat sampai akhir tahun anggaran.

**c. Tindakan yang telah dilaksanakan**

- Melakukan koordinasi secara berkala dengan KPPN Purwakarta dan Kanwil Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat terkait pelaksanaan anggaran.
- Melakukan multi layer checking pembuatan SPM dengan melibatkan Operator, Bendahara Pengeluaran, PPSPM, dan PPK.
- Melakukan revisi administrasi dalam rangka penyesuaian halaman III DIPA.
- Melakukan koordinasi dengan Seksi Teknis terkait rencana penarikan dana bulanan dan capaian output yang ditargetkan dalam DIPA
- Melakukan penyesuaian anggaran dan RPD tiap awal triwulan dan revisi tingkat Kanwil DJPB atau DJA agar capaian penyerapannya dapat optimal.
- Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak khususnya untuk kegiatan belanja modal pembangunan rumah dinas yang dapat diselesaikan dengan tepat waktu dan optimal penyerapan anggarannya.

**d. Rekomendasi Rencana Aksi**

- Terus melakukan koordinasi secara berkala dengan KPPN Purwakarta dan Kanwil Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat terkait pelaksanaan anggaran.
- Melakukan koordinasi dengan Seksi Teknis terkait kebutuhan penarikan anggaran bulanan dan capaian output yang ditargetkan dalam DIPA.

**14. Indeks tata Kelola pengadaan barang dan jasa**

IKU indeks tata Kelola pengadaan barang dan jasa memiliki tujuan untuk meningkatkan tata kelola pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Keuangan IKU ini mengukur komponen berikut:

- a. Kualitas Pengelolaan Pengadaan (diukur dari Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri); dan

b. Indeks Tata Kelola Pengadaan yang meliputi SIRUP, E-Tendering, E-Purchasing Katalog, Non E-Tendering dan Non E-Purchasing, dan E-Kontrak.

Target indeks tata Kelola pengadaan barang dan jasa pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta tahun 2025 ditetapkan sebesar **100%** yang dapat direalisasikan dengan capaian maksimal sebesar **120%** dari target.

KPKNL	SS.6 Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif							
Purwakarta	6b-N Indeks tata Kelola pengadaan barang dan jasa							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/Kp
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	

**a. Isu Utama dan Implikasi**

- Satker vertikal berpotensi tidak memiliki komponen IKU yang masuk dalam bobot perhitungan, seperti e-Tendering/Seleksi, e-Purchasing, dan/atau e-Kontrak, terlebih lagi di Tahun ini, adanya instruksi Presiden terkait kebijakan efisiensi yang berdampak beberapa unit tidak memiliki belanja modal.
- Kebijakan realisasi komponen SIRUP, dapat terealisasi capaian maksimal yang diakui sebesar 120%. Mengingat adanya nilai capaian RUP yang sangat signifikan, yang disebabkan adanya revisi DIPA/POK mengikuti kebijakan efisiensi.

**b. Akar Masalah**

Anggaran yang diumumkan di aplikasi SIRUP merupakan anggaran yang belum mendapatkan efisiensi, sehingga realisasi SIRUP masih cukup tinggi.

**c. Tindakan yang telah dilaksanakan**

- Melakukan belanja modal kendaraan dinas roda 2 dengan metode e-Purchasing.
- Melakukan koordinasi dengan Kantor Pusat DJKN dan Biro Manajemen BMN dan Pengadaan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan RI.
- Melakukan Koordinasi dengan stakeholder.
- Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak khususnya untuk kegiatan belanja modal pembangunan rumah dinas yang dapat diselesaikan dengan tepat waktu dan optimal penyerapan anggarannya.

**d. Rekomendasi Rencana Aksi**

- Terus aktif dan berkesinambungan melakukan koordinasi dengan Kantor Pusat DJKN dan Biro Manajemen BMN dan Pengadaan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan RI dalam rangka tertib pengadaan barang dan jasa.

- Melakukan Koordinasi dengan stakeholder.

## 15. Persentase pengembangan kompetensi pegawai

Kegiatan pelatihan dilakukan sebagai upaya peningkatan kompetensi pegawai. Pengajaran diklat pegawai disesuaikan dengan tugas dan fungsi untuk meningkatkan *hard competency*.

Target persentase pengembangan kompetensi pegawai untuk mengukur persentase banyaknya pegawai di KPKNL Purwakarta yang telah memenuhi standar pengembangan pegawai dan telah sesuai dengan perencanaan pengembangannya. Bawahan telah memenuhi kriteria bila memenuhi minimal 25 JP. Di samping itu, pengukuran juga dilakukan terhadap pemenuhan peserta baik secara jumlah ataupun kualifikasi untuk pemanggilan pelatihan tahun 2025.

Target persentase pengembangan kompetensi pegawai pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta tahun 2025 ditetapkan sebesar **80%** dan dapat direalisasikan sebesar **93,20%** atau sebesar **116,50%** dari target.

KPKNL	SS.6 Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif							
Purwakarta	6c-N Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/Kp
Target	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%	Max/TLK
Realisasi	29,00%	66,86%	66,86%	81,71%	81,71%	93,20%	93,20%	
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	116,50%	116,50%	

### a. Isu Utama dan Implikasi

- Sampai dengan triwulan IV tahun 2025, jumlah bawahan seluruhnya 26 pegawai, jumlah bawahan yang telah melebihi kriteria kompetensi pegawai sejumlah 26 pegawai. Dan jumlah pegawai yang memenuhi panggilan diklat sejumlah 21 pegawai (100%). Semua pegawai dihimbau untuk mengikuti diklat sesuai competency yang diperlukan pada seksinya baik melalui e-learning maupun Pelatihan jarak jauh.
- Tingkat Kualitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembinaan Mental mendapatkan Nilai Pelaksanaan Kegiatan sebesar 120.

### b. Akar Masalah

- Mendorong pegawai untuk mengikuti pelatihan.
- Pengembangan Kompetensi Mandatory cukup dominan.
- Realisasi Pengembangan Kompetensi di luar rencana cukup banyak.
- Ketepatan usulan diklat.

**c. Tindakan yang telah dilaksanakan**

- Monitoring keikutsertaan pegawai dalam program pengembangan kompetensi secara berkala.
- Penyusunan rencana melalui IDP.
- Mencatat tambahan rencana karena ada pengembangan kompetensi Mandatory.
- Mencatat seluruh realisasi pengembangan kompetensi, yang direncanakan dan yang diluar rencana.
- Memastikan semua panggilan diklat dapat dipenuhi baik oleh yang bersangkutan atau penggantinya
- Melaporkan ke Kanwil sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

**d. Rekomendasi Rencana Aksi**

- Mengusulkan nama-nama pegawai untuk mengikuti diklat yang sesuai dengan pendidikan yang dimiliki serta mengingatkan kembali untuk mengikuti diklat.
- Terus mencatat tambahan atas rencana pengembangan kompetensi karena ada intervensi pengembangan kompetensi mandatory.
- Terus mencatat realisasi pengembangan kompetensi di luar rencana, sebagai bahan perbaikan rencana dikemudian hari.
- Feedback dari Peserta segera dinilai agar 120.
- Terus mencatat realisasi pengembangan kompetensi di luar rencana, sebagai bahan perbaikan rencana dikemudian hari.

**16. Indeks penanganan permasalahan hukum**

IKU Indeks penanganan permasalahan hukum bertujuan untuk mendorong terlaksananya penanganan permasalahan hukum yang optimal serta terselesaikannya permasalahan di bidang hukum yang dihadapi oleh unit organisasi beserta aparatur di dalamnya terkait pelaksanaan tugas dan fungsi.

Untuk mengendalikan kerugian organisasi diukur melalui 2 (dua) komponen yaitu:

a. Indeks Penanganan Permasalahan Hukum di Pengadilan (dengan bobot 80%)

Pengukuran ketepatan penanganan permasalahan hukum yang dihadapi terkait tugas dan fungsi DJKN, baik litigasi maupun non litigasi. Pengukuran dimulai pada saat Relaas Gugatan/Panggilan Sidang diterima oleh DJKN, kemudian sesuai dengan tahapan penanganan hingga permasalahan hukum/perkara dimaksud dinyatakan selesai/berkekuatan hukum tetap.

Ruang lingkup/objek komponen:

- Perkara N saat belum terdapat putusan
- Perkara di lingkup Kanwil didapat dari penanganan perkara yang dilakukan Kanwil sendiri, maupun penanganan perkara yang dilakukan KPKNL di lingkungannya.

b. Indeks Putusan Perkara Berkekuatan Hukum Tetap (dengan bobot 20%).

Berkekuatan hukum tetap adalah putusan yang inkracht van gewijsde. Artinya terhadap keputusan itu tidak lagi terbuka suatu jalan hukum pada hakim lain atau hakim itu juga untuk mengubah keputusan itu.

Klasifikasi putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap didasarkan pada akibat hukum yang timbul dari ditetapkannya putusan perkara oleh Majelis Hakim.

Ruang lingkup/objek komponen:

- Perkara N saat sudah terdapat putusan
- Perkara di lingkup Kanwil didapat dari penanganan perkara yang dilakukan Kanwil sendiri, maupun penanganan perkara yang dilakukan KPKNL di lingkungnya.

Target Indeks penanganan permasalahan hukum pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta tahun 2025 sebesar **100**. Dari target tersebut, diperoleh capaian indeks sebesar **114,97** dengan perhitungan persentase capaian IKU sebesar **114,97%**.

KPKNL	SS.7 Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif							
Purwakarta	7a-CP Indeks penanganan permasalahan hukum							
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/Kp
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLK
Realisasi	117,28	118,17	118,17	117,19	117,19	114,97	114,97	
Capaian	117,28%	118,17%	118,17%	117,19%	117,19%	114,97%	114,97%	

<b>Komponen A</b>	
Jumlah Indeks Tahapan	2185
Jumlah Perkara	23
Target Komponen A	85
Indeks Komponen A	111,76%
<b>Komponen B</b>	
Jumlah Indeks Tahapan	4600
Jumlah Perkara	40
Target Komponen A	90
Indeks Komponen A	127,78%
<b>Nilai IKU</b>	<b>114,97%</b>

**a. Isu Utama dan Implikasi**

Indeks Penanganan Permasalahan Hukum di Pengadilan (80%) adalah hasil penjumlahan seluruh Nilai Indeks dari setiap perkara komponen A: 2.185

Jumlah perkara komponen A: 23

Indeks Putusan Perkara Berkekuatan Hukum Tetap (20%)

Hasil penjumlahan seluruh Nilai Indeks dari setiap perkara komponen B: 4.600

Jumlah perkara komponen B: 40

**b. Akar Masalah**

- Apabila terdapat putusan yang telah menang kemudian banding/kasasi apabila KPKNL tidak mengajukan kontra memori banding/kasasi sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap maka realisasi capaian tidak dapat dihitung.
- Hasil putusan menang/kalah tergantung pada penilaian Majelis Hakim Pengadilan.

**c. Tindakan yang telah dilaksanakan**

- Menghadiri sidang secara efektif dan efisien sesuai tahapan penanganan perkara.
- Mengunggah jawab e-court secara tepat waktu supaya tidak tertinggal hak jawab.

**d. Rekomendasi Rencana Aksi**

- Menghadiri sidang secara efektif dan efisien.
- Mengunggah jawaban sidang di e-court secara tepat substansi dan tepat waktu.

**17. Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik**

Pengelolaan Informasi Publik pada seluruh unit Kementerian Keuangan berlandaskan pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PMK Nomor 110 Tahun 2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan. Adapun kewajiban yang dimiliki oleh pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) adalah penyampaian informasi publik, pelaporan pengelolaan layanan informasi publik, dan penunjukan petugas pengelola layanan informasi publik.

Dalam penyampaian informasi publik, pengelola layanan informasi publik pada Kanwil DJKN/KPKNL perlu melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan unit teknis pemilik data sesuai dengan permintaan informasi yang diajukan dari pemangku kepentingan. Adapun jangka waktu penyampaian informasi publik ditentukan sebagaimana amanat dari UU Nomor 14 Tahun 2008 dan PMK Nomor 110 Tahun 2022. Selain penyampaian informasi publik, pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) bertanggung jawab dalam menyampaikan laporan pengelolaan informasi publik yang disampaikan kepada pelaksana PPID di atasnya sesuai dengan norma waktu yang diatur dalam PMK Nomor 110 Tahun 2022 serta pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) wajib menyediakan, mengumumkan dan memutakhirkan Informasi Publik Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala, Informasi Publik yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta dan Informasi Publik Tersedia Setiap Saat secara berkala pada masing-masing website untuk menjaga agar Informasi Publik tetap akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

IKU Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan layanan informasi publik yang tepat waktu. IKU ini terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu:

- 1) Ketepatan waktu penyampaian informasi publik atas permintaan informasi publik dari pengguna layanan;
- 2) Ketepatan waktu penyampaian laporan informasi publik;
- 3) Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Publik pada Website.

Target IKU Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta pada tahun 2025 adalah sebesar **indeks 80** dan dapat direalisasikan sebesar **indeks 112** atau dipersentasekan sebesar **140%** dari target (persentase capaian maksimal 120%).

KPKNL		SS.7 Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif						
Purwakarta		7b-N Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/Kp
Target	80	80	80	80	80	80	80	Max/TLK
Realisasi	118	114	114	113	113	112	112	
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	

#### a. Isu Utama dan Implikasi

- Peningkatan efektivitas penyediaan layanan data/informasi publik bagi masyarakat umum mengenai Kemenkeu, implikasinya adalah bahwa informasi terkait kebijakan, tujuan dan program pengelolaan keuangan dan kekayaan negara melalui kampanye komunikasi yang efektif, tepat sasaran dan berdampak terhadap peningkatan pengetahuan, dukungan, dan partisipasi publik tersampaikan kepada masyarakat luas.
- Realisasi Capaian pengelolaan informasi publik tahun 2025 sebesar 112 terdiri dari: Ketepatan waktu penyampaian laporan ppid dengan indeks sebesar 120 (laporan nihil), Ketepatan waktu penyediaan dan pemutakhiran informasi publik pada website dengan indeks sebesar 112 dari target 80.

#### b. Akar Masalah

- Sampai dengan tahap ini belum ditemukan kendala untuk mencapai target capaian pada tahun 2025.

#### c. Tindakan yang telah dilaksanakan

- Memberikan tanggapan/jawaban sesuai norma waktu yang ditentukan
- Menyampaikan laporan pengelolaan informasi publik kepada pelaksana PPID Tk. II (Kanwil) sesuai dengan norma waktu yang ditentukan

- Menyediakan, mengumumkan dan memutakhirkan Informasi Publik yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala, Informasi Publik yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta dan Informasi Publik Tersedia Setiap Saat secara berkala pada website KPKNL Purwakarta

#### **d. Rekomendasi Rencana Aksi**

- Menyampaikan Informasi Publik atas masuknya permintaan Informasi Publik dari Pengguna Layanan.
- Melakukan koordinasi dengan seksi teknis terkait sumber data.
- Melakukan penyediaan dan pemutakhiran daftar informasi publik yang wajib dipublikasikan.

### **18. Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko**

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis, maka diperlukan sistem penilaian kinerja sebagai bagian dari sistem pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan serta penilaian kualitas manajemen risiko pada unit organisasi.

Sebagaimana telah diterbitkan, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang manajemen kinerja di lingkungan kementerian keuangan, memberikan pengaturan dan pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kinerja baik pada unit organisasi maupun kepada setiap pegawai.

Untuk memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan pengelolaan kinerja dilakukan, diperlukan pelaksanaan review atas implementasi pengelolaan kinerja tersebut.

Review Pengelolaan dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap empat aspek pengelolaan kinerja, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan/eksekusi, monitoring dan evaluasi, serta efektivitas edukasi pengelolaan kinerja. Review atas kualitas manajemen risiko dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap pelaksanaan identifikasi, pemantauan, dan mitigasi risiko serta didukung dengan edukasi manajemen risiko yang efektif dan ketersediaan anggaran pelaksanaan mitigasi atas risiko. Masing-masing komponen diberikan bobot dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kebutuhan organisasi sebagai berikut: 1. Indeks Pengelolaan Kinerja Organisasi (bobot 30%); Indeks Pengelolaan Kinerja Pegawai (bobot 30%); 2. Indeks Kualitas Manajemen Risiko (bobot 40%).

Target Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta tahun 2025, yaitu **80**. Dari target tersebut dapat terealisasi capaian sebesar **98,92** atau dengan persentase capaian

sebesar **123,65%** dari target atau persentase capaian maksimal sebesar **120%** dari target.

PKNL	SS.8 Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif							
	Purwakarta 8b-N Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/Kp
Target	80	80	80	80	80	80	80	Max/TLK
Realisasi	99,20	99,45	99,45	99,50	99,50	98,92	98,92	
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	

IKU	Uraian	Januari	Februari	Sampai dengan			
				Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
<b>REALISASI IKU</b>				<b>118,00</b>	<b>114,00</b>	<b>112,67</b>	<b>112,00</b>
Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif							
8a-N Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko/TLK							
a	Nilai Kualitas Manajemen Kinerja Organisasi (30%)	#N/A	#N/A	100	100,00	100,00	96,70
b	Nilai Kualitas Manajemen Kinerja Pegawai (30%)	#N/A	#N/A	99	98,66	98,66	97,94
c	Nilai Kualitas Manajemen Risiko (40%)	#N/A	#N/A	99	99,62	99,75	99,83
<b>REALISASI IKU</b>		<b>#N/A</b>	<b>#N/A</b>	<b>99,20</b>	<b>99,45</b>	<b>99,50</b>	<b>98,92</b>

#### a. Isu Utama dan Implikasi

- Aspek pengukuran kualitas implementasi manajemen kinerja dan risiko dibagi menjadi 3 yaitu:
  - Kinerja Organisasi
  - Kinerja Pegawai
  - Risiko
- Terkait perubahan dan informasi pengelolaan kinerja & risiko ini sangat dinamis, sehingga perlu beradaptasi dan melakukan perbaikan dengan cepat dan tepat.
- Terdapat top risk yang perlu dimitigasi, sehingga perlu dilakukan addendum.
- Penilaian terhadap manajemen kinerja (baik pegawai maupun organisasi) dan risiko semakin mendetil dan kompleks.
- Implikasi:
  - Keterlambatan dalam merespon perubahan menyebabkan pengelolaan kinerja dan risiko menjadi tidak relevan;
  - Beban kerja meningkat.

#### b. Akar Masalah

- Pembaruan Informasi dan tenggat waktu yang terlalu cepat menyebabkan kualitas implementasi manajemen kinerja dan risiko menjadi kurang maksimal
- Kapasitas sumber daya manusia saat ini belum memadai untuk mengimbangi peningkatan beban kerja yang terus meningkat
- Penilaian/Reviu dilakukan oleh Kanwil DJKN Jawa Barat.

**c. Tindakan yang telah dilaksanakan**

- Menyusun PK dan PMR Kemenkeu Three.
- Menyusun SKP Eselon IV, Jabatan Fungsional, dan Pelaksana, Manual IKU, dan Lembar Penetapan Manual IKU, dan Matriks *Cascading* Tahun 2025.
- Melaksanakan dokumentasi terkait pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengelolaan kinerja dengan baik, antara lain dokumen terkait *Refinement* Penyusunan IKU dan dokumentasi pelaksanaan penandatanganan SKP seluruh pejabat/pegawai.
- Mengikuti e-learning/PJJ terkait risiko kinerja.

**d. Rekomendasi Rencana Aksi**

- Melaksanakan seluruh tahapan pengelolaan kinerja organisasi dan kinerja pegawai serta melaksanakan seluruh tahapan pengelolaan manajemen risiko.
- Melakukan *monitoring* dan evaluasi pengelolaan kinerja Organisasi dan Pegawai secara berkala.

**• CAPAIAN KINERJA DALAM KURUN WAKTU 5 (LIMA) TAHUN TERAKHIR**

Perbandingan capaian kinerja pada KPKNL Purwakarta Tahun 2025 dengan capaian kinerja sebelumnya tahun 2024, 2023, 2022, dan 2021, sebagai berikut:

**PNBP Pengelolaan BMN**

NO	URAIAN	TAHUN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1.	PNBP Aset	2021	6.006.000.000	6.259.167.351	104,21%
2.	PNBP Aset	2022	6.300.000.000	7.198.866.440	114,27%
3.	PNBP Aset	2023	6.400.000.000	9.239.221.640	144,36%
4.	PNBP Aset	2024	6.450.000.000	7.178.611.051	111,30%
5.	PNBP Aset	2025	7.550.000.000	10.630.535.162	140,80%

**PNBP Bea Lelang**

NO	URAIAN	TAHUN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1.	Bea Lelang	2021	11.635.000.000	10.749.304.107	92,38%
2.	Bea Lelang	2022	18.305.000.000	20.393.163.290	111,41%
3.	Bea Lelang	2023	11.807.000.000	8.230.497.307	69,71%
4.	Bea Lelang	2024	11.807.000.000	9.231.127.481	78,18%
5.	Bea Lelang	2025	7.396.700.000	10.345.699.746	139,87%

### Pokok Lelang

NO	URAIAN	TAHUN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1.	Pokok Lelang	2021	249.000.000.000	304.344.064.566	122,23%
2.	Pokok Lelang	2022	402.500.000.000	453.432.212.088	112,65%
3.	Pokok Lelang	2023	269.407.000.000	243.674.725.055	90,45%
4.	Pokok Lelang	2024	269.407.000.000	266.236.504.140	98,82%
5.	Pokok Lelang	2025	321.567.500.000	279.131.160.390	86,80%

### PNBP Pengurusan Piutang Negara

NO	URAIAN	TAHUN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1.	BIAD PPN	2021	38.000.000	7.590.195	19,97%
2.	BIAD PPN	2022	13.450.000	13.054.697	97,06%
3.	BIAD PPN	2023	2.500.000	4.113.392	164,54%
4.	BIAD PPN	2024	15.044.500	36.480.345	242,48%
5.	BIAD PPN	2025	6.000.000	2.448.728	40,81%

### Piutang Negara Dapat Diselesaikan (PNDS)

NO	URAIAN	TAHUN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1.	Penyelesaian Outstanding tahun 2017 ke Bawah	2021	884.628.832	1.130.552.249	127,8%
2.	Penyelesaian Outstanding	2022	301.700.000	709.839.418	235,28%
3.	Penurunan Outstanding	2023	1.060.000.000	1.253.678.702	118,27%
4.	Penurunan Outstanding	2024	878.500.000	975.006.548	110,9%
5.	Penurunan Outstanding	2025	100.000.000	160.494.486	160,49%

### BKPN Yang Dapat Diselesaikan

NO	URAIAN	TAHUN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1.	BKPN Selesai	2021	30	31	103,33%
2.	BKPN Selesai	2022	30	30	100%
3.	BKPN Selesai	2023	9	9	100%
4.	Persentase Saldo BKPN	2024	86%	75,86%	111,79%
5.	BKPN Selesai	2025	5	8	160%

## B. Realisasi Anggaran dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2025 Pada KPKNL Purwakarta

### Rencana Kerja

RINCIAN OUTPUT	PIC	Pagu	Target Output
Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara	PKN	6.800.000	17
Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara	PN	4.800.000	2
Sosialisasi/Edukasi di Bidang Lelang	Lelang	2.132.000	7
Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara	PKN & Penilaian	67.869.000	35
Keputusan Hasil Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara	PN	24.448.000	20
Rekomendasi Hasil Kajian Portofolio Aset	PKN	22.020.000	194
Risalah Lelang	Lelang	19.476.000	600
Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara	PKN	7.680.000	1
Rekomendasi Hasil Penilaian	Penilaian	14.960.000	2
Penggalian Potensi Lelang	Lelang	28.939.000	2
Aset BUN yang Dikelola	PKN	153.486.000	129
Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipkatkan (PN)	PKN	26.592.000	249
Layanan Bantuan Hukum	HI	35.766.000	25
Kerumahtanggaan	Umum	114.945.000	12
Layanan Perkantoran	Umum	1.719.874.000	12
Peralatan Fasilitas Perkantoran	Umum	119.349.000	4
Kendaraan Bermotor	Umum	28.000.000	1
Gedung/Bangunan	Umum	2.587.040.000	200
Pembinaan/Edukasi Publik	HI	15.842.000	20
Kehumasan	HI	21.120.000	20
Rekomendasi Kepatuhan Internal	KI	21.048.000	5
<b>Total</b>		<b>5.042.186.000</b>	

### Penggunaan Sumber Daya

Berkenaan dengan efisiensi penggunaan Sumber Daya pada KPKNL Purwakarta dalam rangka pembinaan di kepegawaian, berdasarkan data dan usulan ke Kantor Pusat per 31 Desember 2025, disampaikan sebagai berikut:

- a. Jumlah pegawai ASN : 27 orang
- b. Kenaikan pangkat : 4 orang
- c. Kenaikan Gaji Berkala : 13 orang
- d. Ijin belajar : 3 orang
- e. Pegawai pensiun : 0 orang
- f. Pegawai mengikuti diklat : 21 orang

Dalam hal anggaran, pada Tahun Anggaran 2025 KPKNL Purwakarta mendapat alokasi anggaran awal sebesar **Rp5.042.186.000** (lima miliar empat puluh juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan terdapat blokir anggaran dalam rangka efisiensi

sejumlah **Rp1.546.733.000** (satu miliar lima ratus empat puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) menjadi sebesar **Rp3.495.453.000** (tiga miliar empat ratus sembilan puluh lima juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah). Dari total pagu anggaran yang tersedia dalam DIPA Tahun 2025 tersebut, telah direalisasikan sebesar **Rp3.115.574.372** atau 89,13%. Dalam hal ini telah dilakukan efisiensi sebesar **Rp379.878.628** atau 10,87% dengan realisasi capaian output memenuhi target yang telah ditetapkan dengan rincian, sebagai berikut:

No	Jenis Belanja	DIPA	Realisasi	Persentase
1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0%
2	Belanja Barang	Rp2.063.624.000	Rp1.853.227.422	89,80%
3	Belanja Modal	Rp1.431.829.000	Rp1.262.346.950	88,16%
	<b>Total</b>	<b>Rp3.495.453.000</b>	<b>Rp3.115.574.372</b>	<b>89,13%</b>

Nilai Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran pada tahun 2025 yang telah direalisasikan untuk mewujudkan kinerja organisasi KPKNL Purwakarta, sebagai berikut:

	Indikator IKU	Nilai	Bobot	Nilai Akhir
<b>A)</b>	<b>Nilai IKPA (Bobot 50%)</b>			<b>98.11</b>
	1. Revisi DIPA	100.00	10	10.00
	2. Deviasi Hal III DIPA	100.00	15	15.00
	3. Penyerapan Anggaran	90.54	20	18.11
	4. Belanja Kontraktual	100.00	10	10.00
	5. Penyelesaian Tagihan	100.00	10	10.00
	6. Pengelolaan UP dan TUP	100.00	10	10.00
	7. Dispensasi SPM	0	0	0
	8. Capaian Output	100.00	25	25.00
<b>B)</b>	<b>Nilai SMART (Bobot 50%)</b>			<b>97.81</b>
	1. Capaian Rincian Output	100.00	75.00%	75.00
	2. Penggunaan SBK	72.73	10.00%	7.27
	3. Efisiensi SBK	67.55	15.00%	10.14
	<b>Nilai Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran s.d. Triwulan IV</b>			<b>95.26</b>
	<b>Realisasi IKU IKKPA Triwulan IV</b>			<b>120.00</b>

## C. Kinerja Lain-lain

### 1. Inovasi

- 1) Inovasi SOP Percepatan Layanan Persetujuan Sewa BMN Berupa ATM dan Kantin

Merupakan inovasi yang mengedepankan percepatan pemberian layanan pemrosesan persetujuan sewa Barang Milik Negara dengan rencana pemanfaatan sebagai Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan Kantin. Dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 69/KN/2023 Tentang Integrasi Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara Pada Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, jangka waktu penyelesaian persetujuan/penolakan sewa BMN berupa tanah dan/atau bangunan dengan jumlah objek BMN yang diajukan sebanyak 1 s.d. 5 objek adalah paling lambat 19 (sembilan belas) hari kerja. Melalui inovasi ini, sesuai Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Purwakarta Nomor 54/KNL.0804/2024 Tentang Penetapan Inovasi Standar Operasional Prosedur (Standard Operational Procedure) Percepatan Layanan Persetujuan Sewa Barang Milik Negara Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Purwakarta, jangka waktu penyelesaian persetujuan/penolakan sewa BMN berupa tanah dan/atau bangunan atas 1 objek BMN dengan rencana pemanfaatan sebagai ATM dan kantin adalah paling lambat 12 (dua belas) hari kerja.

Latar Belakang:

Kebutuhan pengguna jasa untuk mendapatkan layanan KPKNL yang lebih cepat khususnya berupa pemrosesan persetujuan sewa BMN berupa tanah dan/atau bangunan dengan rencana pemanfaatan sebagai ATM dan kantin.

Tujuan:

Penyempurnaan proses bisnis dan peningkatan kualitas layanan KPKNL Purwakarta melalui SOP percepatan pemrosesan persetujuan sewa BMN berupa tanah dan/atau bangunan dengan rencana pemanfaatan sebagai ATM dan kantin.

Jenis Inovasi:

SOP percepatan pemrosesan persetujuan sewa BMN berupa tanah dan/atau bangunan dengan rencana pemanfaatan sebagai ATM dan kantin.

## **2) Podcast\_Kanal On Air (Podcast Informatif Seputar Kekayaan Negara dan Lelang via YouTube)**

Merupakan sarana penyampaian informasi kepada publik dengan media kekinian, santai namun tetap informatif dan akuntabel.

Latar Belakang:

Penyampaian informasi tugas dan fungsi pokok KPKNL Purwakarta di bidang Pengelolaan Kekayaan Negara dan Pelayanan Lelang kepada masyarakat sangat diperlukan sebagai bagian dari fungsi layanan dan keterbukaan informasi dengan model penyampaian yang dinilai mampu menjangkau pengguna layanan dan umumnya masyarakat secara lebih luas dengan media online yang populer.

Tujuan:

Memberikan informasi tugas dan fungsi KPKNL Purwakarta sebagai instansi vertikal DJKN dengan kemasan kekinian, informatif dan akuntabel.

Jenis Inovasi:

Podcast Kanal On Air dan video kegiatan.

### **3) Talk To Me**

Sarana Pengaduan berbasis elektronik melalui scan barcode oleh pengguna layanan melalui perangkat *Smartphone*.

Latar Belakang:

Adanya kebutuhan untuk mengakomodir pengaduan/saran dari pengguna layanan secara cepat dan *online*.

Tujuan:

Sarana evaluasi dalam upaya meningkatkan perbaikan pelayanan KPKNL Purwakarta kepada pengguna layanan.

Jenis Inovasi:

Sarana pengaduan berbasis elektronik melalui scan barcode yang ditindaklanjuti dengan telepon/wa/email.

### **4) Pendato (Pendataan Pegawai WFH/WFO)**

Merupakan aplikasi berbasis google sheet yang berfungsi untuk mendata pegawai yang akan melaksanakan WFH (Work From Home) atau WFO (Work From Office).

Latar Belakang:

Surat Edaran Menteri PAN-RB nomor SE-14 tahun 2021 tentang penyesuaian sistem kerja dalam masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di wilayah Jawa dan Bali 3.

Surat Edaran Menteri Keuangan nomor SE-12/MK.1/2021 tentang Penegasan Kembali Ketentuan Dalam Rangka Pencegahan dan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Nota Dinas Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan nomor ND- 994/SJ/2021 tanggal 4 Juli 2021 hal Penegasan Pembatasan Bepergian dan Cuti serta Penyesuaian Sistem Kerja dalam rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Tujuan:

Mempermudah pembagian komposisi pegawai WFH dan WFO dan pengajuan usulan pegawai WFH secara kolektif oleh Sub bagian umum.

Memperoleh data untuk Laporan Harian Monitoring Kondisi Pegawai ke Kantor Pusat DJKN dan Kanwil DJKN Jawa Barat.

Sebagai alat bantu pimpinan dalam monitoring pegawai WFH/WFO.

**Jenis Inovasi:**

Aplikasi berbasis Google Sheet.

**5) Monik PPNPM (Monitoring Kehadiran Pegawai PPNPM)**

Merupakan aplikasi berbasis google Form yang berfungsi untuk Monitoring Pendataan kehadiran Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) secara digital melalui Google Forms (MONIK PPNPN).

Latar Belakang:

Dalam rangka menjalankan protokol kesehatan dan menghindari kontak langsung, maka presensi tidak dapat dilakukan melalui mesin presensi dengan sijek jari, sedangkan belum adanya fitur pada presensi yang digunakan Aparat Sipil Negara untuk PPNPN, maka perlu dibuatkan presensi digital yang memadai bagi PPNPN KPKNL Purwakarta agar dapat menjadi bentuk akuntabilitas kehadiran.

Tujuan:

Menyediakan alat bantu presensi digital yang memadai bagi PPNPN KPKNL Purwakarta agar dapat menjadi bentuk akuntabilitas kehadiran serta sebagai alat bagi pimpinan dalam Monitoring kedisiplinan PPNPM.

Jenis Inovasi:

Aplikasi berbasis Google Form.

**6) Sapa Pagi Senin**

Kegiatan rutin untuk menguatkan nilai-nilai kementerian keuangan dan bertukar informasi antar pegawai serta evaluasi kegiatan.

Latar Belakang:

Adanya kebutuhan untuk media penanaman nilai-nilai Kementerian Keuangan, budaya kerja Kementerian Keuangan dan kode etik/kode perilaku ASN, sharing session pengetahuan baik terkait tugas pokok dan fungsi maupun pengetahuan lain yang bermanfaat bagi pegawai serta sarana monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas setiap minggu.

Tujuan:

Meningkatkan pemahaman dan pembiasaan pegawai akan nilai2/budaya Kemenkeu serta hak dan kewajiban ASN, serta meningkatkan kompetensi pegawai.

Jenis Inovasi:

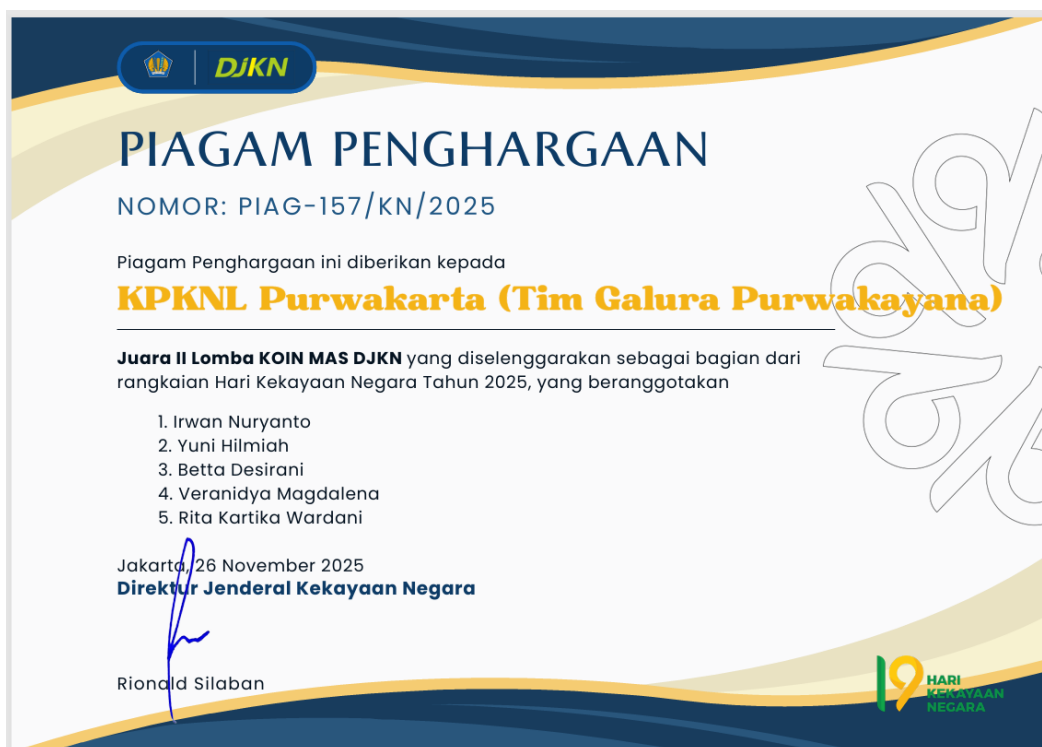
Kegiatan Sapa Pagi Senin melalui pertemuan secara daring media Microsoft teams.

## 2. Prestasi dan Penghargaan Tahun 2025

### 1) Juara II Kompetisi Inovasi Manajer Aset DJKN 24/25

Kompetisi dan Inovasi Manajer Aset (KOIN MAS) Direktorat Jenderal Keayaan Negara (DJKN) ini merupakan ajang tahunan DJKN yang telah memasuki tahun kelima. Didorong untuk menghadirkan inovasi pengelolaan aset negara yang kreatif, aplikatif, dan berdampak nyata dalam meningkatkan efektivitas serta kualitas kinerja manajemen aset di lingkungan DJKN.

KPKNL Purwakarta berkolaborasi dengan Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat, dan Balai Riset Pemuliaan Ikan (BRPI) Subang memperoleh Juara II pada gelaran KOIN MAS DJKN 2024-2025 yang puncaknya diselenggarakan pada tanggal 18 November 2025 di Kantor Pusat DJKN. Penghargaan juara diberikan langsung oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara.



## **BAB IV PENUTUP**

KPKNL Purwakarta yang berlokasi di Jalan Siliwangi Nomor 9, Kabupaten Purwakarta, senantiasa berupaya optimal memenuhi target pada indikator kinerja melalui perencanaan dan strategi pelaksanaan kinerja yang dibahas secara partisipatif oleh pimpinan bersama seluruh pegawai serta melibatkan para pemangku kepentingan melalui Dialog Kinerja Organisasi, *Focus Group Discussion* (FGD), serta kegiatan internalisasi dan sosialisasi yang dilaksanakan baik secara daring maupun luring.

Secara umum, pada Tahun 2025 KPKNL Purwakarta mencatatkan capaian kinerja yang sangat baik. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) per 31 Desember 2025 mencapai 114,27%, meningkat secara signifikan dibandingkan capaian tahun 2024 sebesar 110,79%. Sebagian besar target yang ditetapkan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) telah terealisasi sesuai bahkan melampaui target yang ditentukan. Hanya terdapat satu IKU yang belum mencapai target, yaitu IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang. Ketidacapaian IKU tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain hasil lelang yang laku dengan nilai relatif tidak tinggi, tingginya jumlah lelang Tidak Ada Penawaran (TAP), serta menurunnya realisasi lelang pegadaian seiring meningkatnya jumlah pegadaian swasta dan tingginya tingkat pelunasan gadai tepat waktu pada kantor Pegadaian. Dalam kinerja lainnya, melalui dedikasi tinggi dan kerja sama yang solid dengan para pemangku kepentingan, pada tahun 2025 KPKNL Purwakarta berhasil meraih prestasi sebagai Juara II Kompetisi Inovasi Manajer Aset DJKN 24/25.

Sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan, baik kepada pengguna layanan eksternal maupun internal organisasi, KPKNL Purwakarta terus mengembangkan berbagai inovasi, antara lain Percepatan SOP Layanan, Podcast Kanal On Air sebagai media informasi seputar kekayaan negara dan lelang melalui YouTube, Talk To Me sebagai sarana pengaduan, Aplikasi Pendataan WFH–WFO Pegawai, Aplikasi Monik PPNPN sebagai sistem kehadiran digital pegawai PPNPN, serta program Sapa Pagi Senin.

Di tahun 2025, KPKNL Purwakarta juga berhasil menjaga keberlanjutan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang telah diraih pada tahun 2022. Pencapaian tersebut merupakan hasil komitmen dan kerja bersama seluruh pegawai KPKNL Purwakarta serta dukungan para pemangku kepentingan. Ke depan, KPKNL Purwakarta berkomitmen untuk terus menjunjung tinggi nilai-nilai Kementerian Keuangan, yaitu Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan, serta konsisten menjalankan moto “BAIK” yang mencerminkan Bersih, Akuntabel, Inovatif, dan Konsisten.

## LAMPIRAN

### DAFTAR PENGHARGAAN YANG DIRAIH KPKNL PURWAKARTA TAHUN 2025

No.	Kategori Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Penerima Penghargaan
1.	Juara II Kompetisi Inovasi Manajer Aset (KOIN MAS) DJKN 24-25	Direktur Jenderal Kekayaan Negara	Tim Galurapurwakayana KPKNL Purwakarta

### FOTO PENGHARGAAN

1.

**PIAGAM PENGHARGAAN**  
NOMOR: PIAG-157/KN/2025

Piagam Penghargaan ini diberikan kepada  
**KPKNL Purwakarta (Tim Galura Purwakayana)**

**Juara II Lomba KOIN MAS DJKN** yang diselenggarakan sebagai bagian dari rangkaian Hari Kekayaan Negara Tahun 2025, yang beranggotakan

1. Irwan Nuryanto
2. Yuni Hilmiah
3. Betta Desirani
4. Veraniya Magdalena
5. Rita Kartika Wardani

Jakarta, 26 November 2025  
**Direktur Jenderal Kekayaan Negara**

Rionald Silaban

19 HARI KEKAYAAN NEGARA

GRAND FINAL  
KOIN MAS  
2025

